



L K I P 2020

**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BEKASI**

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bekasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap

komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Bekasi,

2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BEKASI



DR. RENY HENDRAWATI, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2020 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018- 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bandung, dengan hasil **capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 133,34 persen**, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang **SANGAT BAIK** dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran staratgis 1 meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah, terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 125,94%
2. Pencapaian sasaran staratgis 2 meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 222,22%

3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sebesar 66,67%

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2020 dinyatakan “melampaui target”, karena capaiannya rata-rata sebesar 133,34% dari target. Meskipun masih terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu terhadap capaian indikator strategis Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD.

Ke depan untuk mencapai visi Walikota Bekasi berupa terwujudnya Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan melalui pelaksanaan misi kesatu yaitu : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi dan *stakeholder* yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah Kota Bekasi.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 66,023,815,630,- telah direalisasi sebesar Rp58,279,356,766,-. Atau 88.27% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
1 BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi	13
1.3 Aspek Strategis Organisasi	18
1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi.....	19
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	23
2 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	25
2.1.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	27
2.2 Perjanjian Kinerja	29
3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	38
3.3 Akuntabilitas Keuangan	71
3.4 Prestasi Dan Penghargaan	77
4 BAB IV PENUTUP	78
4.1 kesimpulan.....	79
4.2 Rencana Tindak.....	80
5 LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja	83
LAMPIRAN II Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020	88
LAMPIRAN III Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	92
LAMPIRAN IV Prestasi Dan Penghargaan	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian	20
Tabel 1-2	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
Tabel 1-3	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 1-4	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi ..	22
Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	27
Tabel 2-2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi	28
Tabel 2-3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi	29
Tabel 2-4	Alokasi Anggaran Per Triwulan (Perubahan)	30
Tabel 3-1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.	36
Tabel 3-2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi	39
Tabel 3-3	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.....	40
Tabel 3-4	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023	41
Tabel 3-5	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran...	43
Tabel 3-6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.....	44
Tabel 3-7	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat	45
Tabel 3-8	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat	47
Tabel 3-9	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat Target Akhir Renstra 2018-2023.....	47
Tabel 3-10	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat.....	48
Tabel 3-11	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat.....	49
Tabel 3-12	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM	50
Tabel 3-13	Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	51
Tabel 3-14	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai IKM	52
Tabel 3-15	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai IKM Target Akhir Renstra 2018-2023	53
Tabel 3-16	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai IKM	54

Tabel 3-17	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....	55
Tabel 3-18	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas).....	59
Tabel 3-19	Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi	59
Tabel 3-20	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.....	62
Tabel 3-21	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	64
Tabel 3-22	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	64
Tabel 3-23	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas).....	65
Tabel 3-24	Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi.....	66
Tabel 3-25	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat	67
Tabel 3-26	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat.....	69
Tabel 3-27	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	70
Tabel 3-28	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat	70
Tabel 3-29	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat	71
Tabel 3-30	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Per Program Tahun 2020.....	72
Tabel 3-31	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2020.....	72
Tabel 3-31	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 ...	73
Tabel 3-32	Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020	77
Tabel 4-1	Capaian dari IKU tahun 2020	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi	17
Gambar 1-2	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah.....	21
Gambar 1-3	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Gambar 1-4	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah.....	22
Gambar 1-5	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretaris Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2020 menuju perwujudan Visi Kota Bekasi yaitu :

“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Bekasi. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan Misi pertama **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** dengan Tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”**, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dengan indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, “Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD” dan “Persentase Peningkatan PAD”

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah :

1. Indikator Kinerja utama (1) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi; (2) Persentase Capaian IKK yang meningkat; (3) Nilai IKM untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD.
2. Indikator Kinerja utama Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas); untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola

- Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD.
3. Indikator Kinerja utama Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat; untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan PAD.

Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian 8 (delapan) area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023, dimana lima area perubahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan publik dilaksanakan dengan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector*.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2019 dimana capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi sebesar 100 persen, indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat memperoleh capaian kinerja sebesar 173 persen, indikator Nilai IKM memperoleh capaian kinerja sebesar 105 persen, indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) memperoleh capaian kinerja sebesar 312 persen, indikator Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat memperoleh capaian kinerja sebesar 50 persen, maka pada tahun 2020 Sekretariat Daerah harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2019 maupun target yang telah ditetapkan pada Renstra pada tahun 2020. Adapun kinerja yang ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari

realisasi sebesar 100 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah 100 persen, dimana artinya tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 tetap 100 persen.

2. Untuk indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 173 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 65,74 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 38 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah 38 persen, maka tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa IKK 2.1 dari 38 IKK minimal sebanyak 29 IKK meningkat, dan IKK 2.3 dari 29 IKK minimal sebanyak 16 IKK meningkat.
3. Untuk indikator Nilai IKM pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 105 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 83 nilai indeks dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79 nilai indeks. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah 80 nilai indeks, dimana artinya tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa Nilai IKM pada tahun 2020 minimal sebesar 83,01 nilai indeks atau meningkat dari realisasi tahun 2019.
4. Untuk indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 312 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 32 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 sebesar 45 persen, maka tantangan kedepan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa Peningkatan Kualitas AKIP OPD tidak hanya pada kategori B tapi meningkat pada BB atau A.

5. Untuk indikator Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 50 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 50 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen maka tantangan kedepan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah memastikan bahwa Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat pada tahun 2020 meningkat sebesar 50 persen. Adapun upaya yang dilakukan di tahun 2020 adalah :
- a. Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
 - b. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan BUMD;
 - c. Ekspansi dan Diversifikasi Usaha;
 - d. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - e. Perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD;
 - f. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence).

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2020 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2020 ini.

1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi

Kedudukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat

Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
- l. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas:

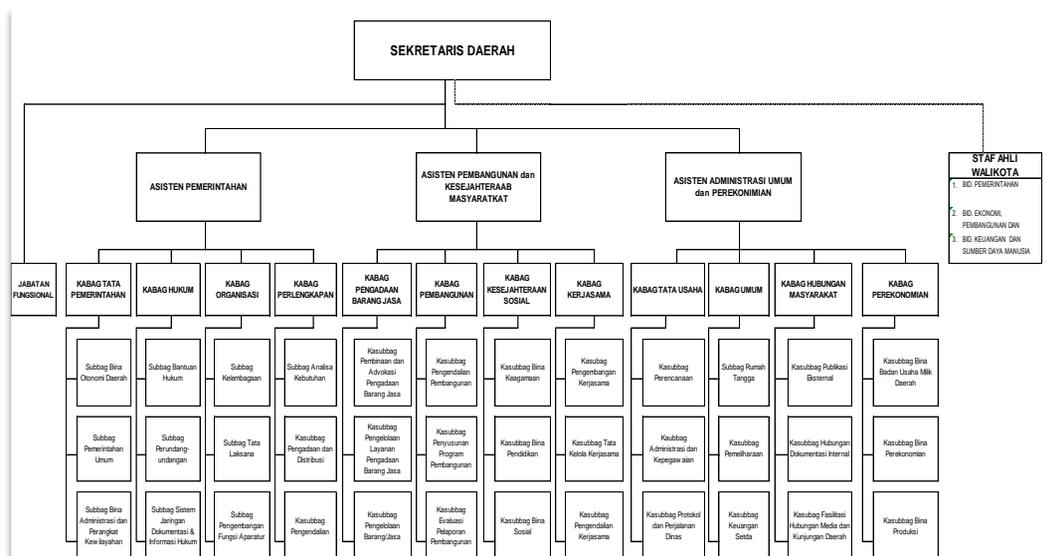
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c) Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tatalaksana;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Fungsi Aparatur.
4. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Pengendalian.
- f. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan:
 1. Bagian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Pembangunan.
 2. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Sosial;
 - b) Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - c) Sub Bagian Bina Pendidikan.
 3. Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Tata Kelola Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama.
 4. Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
- g. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan;

- c) Sub Bagian Keuangan.
- 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - c) Sub Bagian Perencanaan Setda.
- 3. Bagian Humas, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Publikasi Eksternal;
 - b) Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal;
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Kunjungan Daerah.
- 4. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi;
 - c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 1-1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi



1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang memiliki peranan terhadap pelaksanaan:

“perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya”.

Dalam melaksanakan perannya sebagai instansi yang memastikan bahwa pencapaian visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota maju, sejahtera dan ihsan didukung oleh kebijakan yang tepat, koordinasi yang efisien dan organisasi yang tepat ukuran, Sekretariat Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governace*. Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan profesionalisme dan mutu layanan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Melihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki tugas lebih bersifat administratif. Kesempurnaan mekanisme sistem perencanaan, penganggaran biaya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan keinginan yang dicita-citakan. Adapun permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
- c. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi merumuskan program dan kegiatan yang merujuk kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran dengan Indikator kinerja yang terukur yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bekasi.

1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan beberapa layanan publik yang dilaksanakan oleh 11 unit layanan dan sudah dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu:

1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat ke Masyarakat
2. Pelayanan Jasa Surat Menyurat ke OPD
3. Layanan Keprotokolan
4. Layanan Penyerahan Piala Kepala Daerah dan Plakat
5. Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
7. Review dan Penataan Kelembagaan
8. Asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

9. Layanan Administrasi dan Fasilitasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
10. Desk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)
11. Desk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
12. Pelayanan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
13. Pelayanan Penomoran Produk Hukum Daerah
14. Layanan LPSE
15. Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang
16. Fasilitasi Kunjungan Daerah ke Pemerintah Kota Bekasi
17. Penyebarluasan informasi berita kepada media Kota Bekasi
18. Pelayanan Informasi Publik ke Pemerintah Kota Bekasi
19. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi
20. Fasilitasi Pengkajian Kelayakan Rencana Kerja Sama
21. Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerjasama
22. Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan layanan adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 401 orang per 30 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

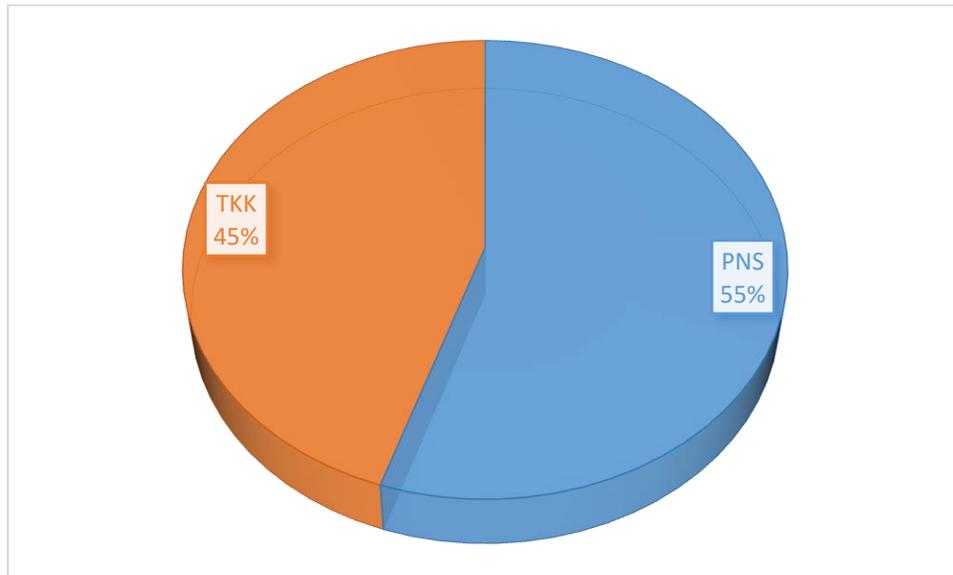
Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1-1
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Status Kepegawaian

PNS	TKK
221	180

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 30 Desember 2020.

Gambar 1-2
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian



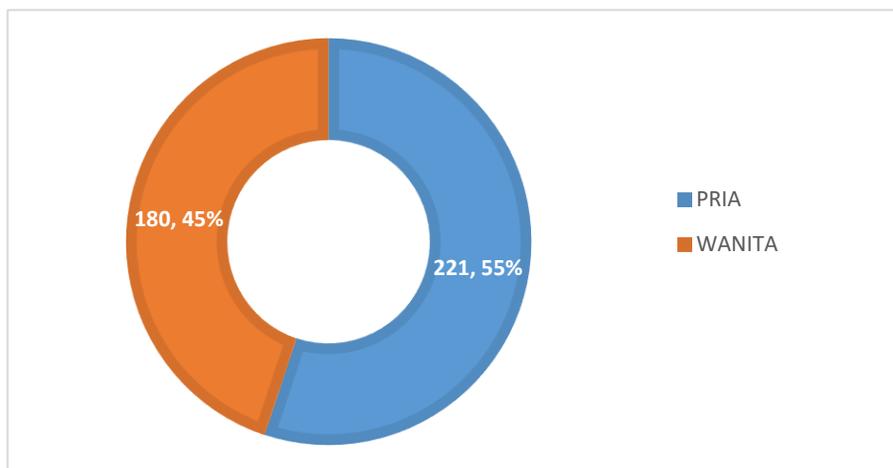
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1-2
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

PRIA	WANITA
221	180

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 30 Desember 2020.

Gambar 1-3
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin



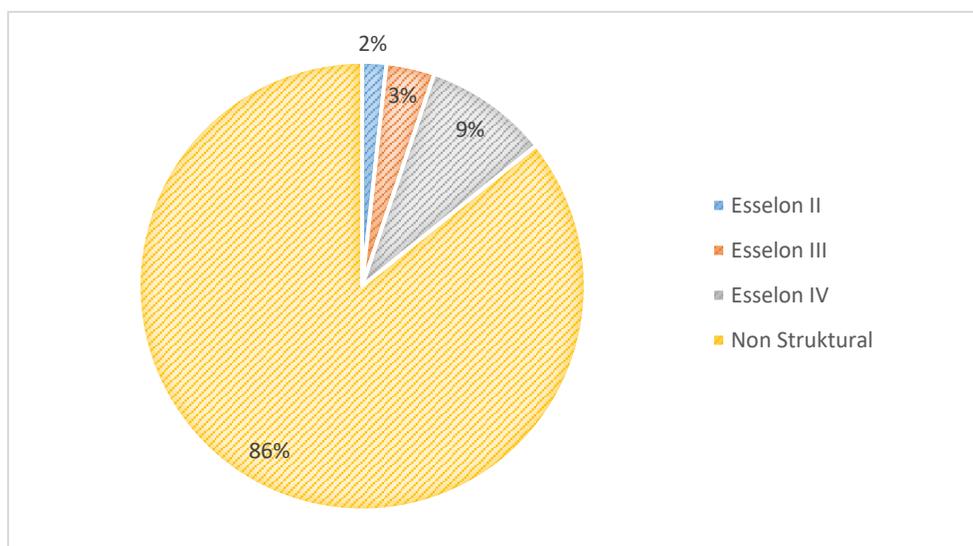
Berdasarkan Jabatan

Tabel 1-3
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jabatan

NO	ESSELONERING	JUMLAH APARATUR
1	Esselon II	7
2	Esselon III	14
3	Esselon IV	36
4	Non Struktural	344

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 30 Desember 2020.

Gambar 1-4
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah
Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan tingkat pendidikan

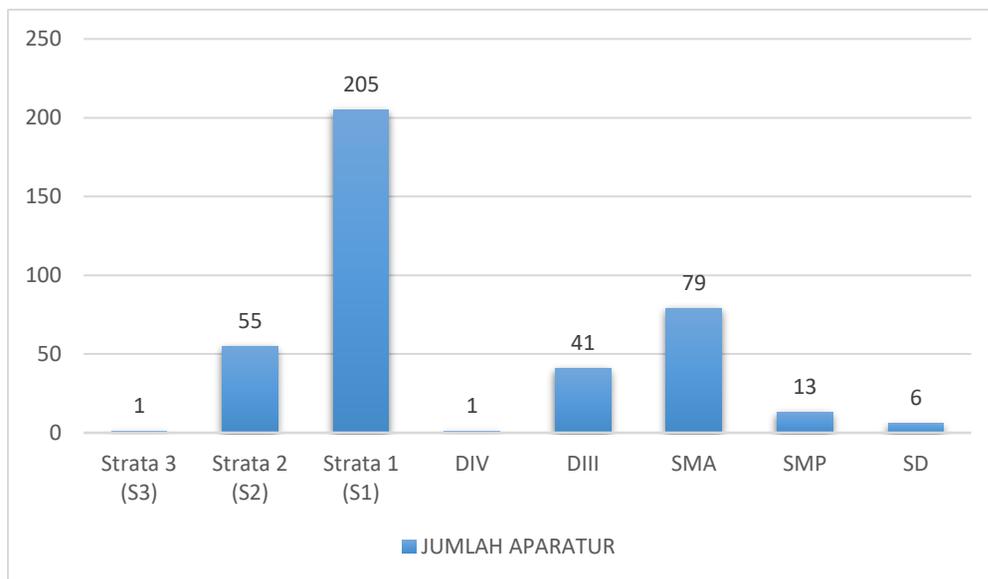
Tabel 1-4
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR
1	Strata 3 (S3)	1
2	Strata 2 (S2)	55
3	Strata 1 (S1)	205
4	DIV	1
5	DIII	41
6	SMA	79
7	SMP	13

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR
9	SD	6

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 30 Desember 2020.

Gambar 1-5
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan



1.5 Sistematisasi Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematisasi penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Sistematisasi Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2018-2023
- B. Tujuan
- C. Sasaran Strategis
- D. Sasaran Program
- E. Indikator Kinerja Utama
- F. Program dan Kegiatan
- G. Perjanjian Kinerja 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi (sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum)
- B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Akuntabilitas Anggaran (Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak kinerja)
- D. Prestasi Organisasi (mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional dalam tahun 2020)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai strategi ini. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Bekasi untuk melakukan proyeksi kondisi masa yang akan datang, sehingga rencana strategis dapat menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja ke masa yang akan datang.

Memperhatikan Peraturan Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 - 2023, Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi menetapkan visi, yaitu **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung pada pelaksanaan misi ke satu yaitu **“Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”** untuk membangun Kota Bekasi. Secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

2.1.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan dan sasaran, dalam RPJMD yang sesuai dengan kedudukan Sekretariat Daerah yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 sebagai unsur staf pendukung Wali Kota yang

melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya dimana dalam hal ini berdasarkan rumusan visi dan misi makan tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama 5 tahun adalah : **Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah.**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah
Tahun 2019 - 2023

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Nilai AKIP Kota	Nilai	64	65,8	67,6	69,4	72
	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	38	38	39	39	40
		Nilai IKM	Nilai	79	80	81	82	83
		Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke atas)	Persen	32	45	57	70
	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD yang sehat	Persen	100	100	100	100	100

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 ditetapkan (lima) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2018-2023 dengan Wali Kota Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian IKU Wali Kota yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang ada. Adapun target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dapat disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2-2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
1.	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Untuk mengetahui jumlah perangkat daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	(Jumlah perangkat daerah yang menetapkan Reformasi Birokrasi/Jumlah perangkat daerah)x100%	Persen	100
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	Untuk mengetahui jumlah IKK yang meningkat	(Capaian IKK yang meningkat/ Jumlah seluruh IKK)x 100%	Persen	38
		Nilai IKM	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
2.	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	Untuk mengetahui peningkatan kualitas AKIP OPD	(Jumlah OPD yang mencapai akuntabilitas kinerja baik/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	Persen	45
3.	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD Dalam	Untuk mengetahui jumlah BUMD yang	(Jumlah BUMD yang sehat/ Jumlah BUMD di	Persen	100

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN/RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
		Kondisi Sehat	berkinerja sehat	Kota Bekasi)x100%		

2.2 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Sebagai Berikut :

Tabel 2-3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	38	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	38
		Nilai IKM	Angka	80	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	80

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
2	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	Persen	45	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	45
3	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II.a) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat dukungan anggaran dari APBD Kota sebesar Rp 83,275,010,100 yang digunakan untuk melaksanakan 94 kegiatan yang terangkum dalam 7 program sebagai berikut:

Tabel 2-4
Alokasi Anggaran Per Triwulan (Perubahan)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	TRIWULAN	TARGET
1	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	13,092,367,000	Triwulan I	2,958,607,500
			Triwulan II	4,539,142,500
			Triwulan III	2,259,806,000
			Triwulan IV	3,334,811,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	8,353,317,610	Triwulan I	4,452,360,000
			Triwulan II	3,777,742,610
			Triwulan III	123,215,000
			Triwulan IV	0
3	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD	0	Triwulan I	0
			Triwulan II	0
			Triwulan III	0
			Triwulan IV	0
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23,273,681,020	Triwulan I	5,887,854,000
			Triwulan II	5,616,319,000
			Triwulan III	5,486,346,510
			Triwulan IV	6,283,161,510
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,859,450,000	Triwulan I	1,998,101,000
			Triwulan II	6,214,251,414
			Triwulan III	5,483,876,100
			Triwulan IV	7,163,221,486
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	445,000,000	Triwulan I	149,997,000
			Triwulan II	125,000,000

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	TRIWULAN	TARGET
			Triwulan III	0
			Triwulan IV	170,003,000
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	Triwulan I	0
			Triwulan II	0
			Triwulan III	0
			Triwulan IV	0

Sedangkan rincian anggaran per kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2-5
Anggaran Per Kegiatan (Perubahan)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23,273,681,020
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,550,300,020
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	385,856,000
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	360,000,000
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330,000,000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70,000,000
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40,000,000
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,225,000,000
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1,000,000,000
12.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12,500,525,000
13.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	162,000,000
14.	Penataan Arsip	-
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	20,859,450,000
15.	Penyediaan Ruang Kerja	1,041,350,000
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	230,000,000
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17,000,000,000
18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,070,000,000
19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	-
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,418,100,000
21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100,000,000
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	445,000,000
22.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170,000,000
23.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	125,000,000
24.	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150,000,000
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	-
25.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-
E.	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	13,092,367,000
26.	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	20,000,000
27.	Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	-
28.	Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60,000,000
29.	Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota	-
30.	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	-
31.	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150,000,000
32.	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi (PRODESKEKEL)	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
33.	Sinergitas Instansi Vertikal	-
34.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi	19,200,000
35.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD	87,030,000
36.	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	-
37.	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-
38.	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	-
39.	Monitoring dan Evaluasi K3	-
40.	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	-
41.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	-
42.	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	-
43.	Penyusunan Peta Proses Bisnis	-
44.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	54,526,000
45.	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	150,000,000
46.	Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2,000,000,000
47.	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	-
48.	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
49.	Penyelenggaraan Keprotokolan	-
50.	Penyelenggaraan KOMDA HIV / AIDS	-
51.	Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1,052,690,000
52.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	150,000,000
53.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	-
54.	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari jadi Kota Bekasi	377,350,000
55.	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	364,050,000
56.	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	-
57.	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	700,000,000
58.	Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	2,865,000,000
59.	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) tahun 2020	-
60.	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	50,000,000
61.	Pengendalian Inflasi Daerah	73,040,000
62.	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	60,000,000
63.	Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	50,000,000
64.	Penyusunan Naskah Kerja Sama	-
65.	Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	-
66.	Pembinaan Kehumasan	-
67.	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	210,400,000
68.	Pembutan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	371,500,000
69.	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219,000,000
70.	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2,500,000,000
71.	Penyelenggaraan penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	39,600,000
72.	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	150,000,000
73.	Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	178,080,000
74.	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	-
75.	Surveillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO	-
76.	Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	-
77.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	243,180,000
78.	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	240,000,000
79.	Pengendalian Pembangunan	82,927,000
80.	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	30,000,000
81.	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2019	21,194,000
82.	Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bekasi	250,000,000
83.	Penyelenggaraan Penilaian RW Siaga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	273,600,000
F.	Program Pembinaan dan Pemantauan	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
84.	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	-
85.	Penyusunan kajian BUMD Persampahan	-
G.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	8,353,317,610
86.	Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	114,360,000
87.	Pengadaan Sarana Mobilitas	4,200,000,000
88.	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	123,215,000
89.	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	2,543,556,210
90.	Pengadaan Meubelair	946,854,600
91.	Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	-
92.	Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	-
93.	Penyediaan Tiang Umbul-umbul, Umbul-umbul, Vitrase dan Tiang Bendera	138,000,000
94.	Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	287,331,800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK), dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah ditetapkan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, memiliki standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Tahun 2020. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya, sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	>91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>80-90	Memuaskan	A
3.	>70-80	Sangat Baik	BB
4.	>60-70	Baik	B
5.	>50-60	Cukup	CC
6.	>30-50	Kurang	C
7.	>0-30	Sangat Kurang	D

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada setiap sasaran startegis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2020 dalam mencapai tujuan Sekretariat Daerah yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalime pengelolaan dan layanan pemerintah, terutama kaitannya untuk

mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2020, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Bekasi tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang dirinci sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 (empat) indikator mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3-1
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	persen	100	100	100
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	persen	38	65,52	172,42
		Nilai IKM	Nilai	80	83,37	104,2
2	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	persen	45	100	222,22

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	persen	100	66.67	66.67

Sumber : Data Olahan Bagian Tata Usaha Setda, 2020

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu meningkatnya profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : *Pertama* persentase perangkat daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 100 persen (tercapai), *kedua* persentase capaian IKK yang meningkat dengan capaian kinerja sebesar 172,42 persen (terlampau) dan *ketiga* nilai indeks kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 104,21 persen (terlampau) maka dapat dikatakan bahwa tujuan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalime pengelolaan dan layanan pemerintah dilihat dari 3 (tiga) indikator tersebut berhasil dengan baik.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya pembinaan akuntabilitas dari perangkat daerah, Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menetapkan persentase peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) organisasi perangkat daerah (kategori B keatas) dengan capaian kinerja 222,22 persen (terlampau) dapat dinterpretasikan tujuan setda pada indikator ini tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD, Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menetapkan indikator kinerja BUMD dalam kondisi sehat dengan

capaian kinerja 57.15 persen (tidak tercapai) dapat diinterpretasikan bahwa tujuan setda pada indikator ini belum tercapai.

Dengan melihat 5 indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana 4 (empat) indikator mencapai target yang ditetapkan sementara hanya 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah yang diukur dengan indikator nilai AKIP pemerintah kota Bekasi.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Layanan Pemerintah

1. Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan dikarenakan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dengan demikian jelas bahwa indeks reformasi birokrasi tepat untuk dijadikan indikator tujuan pada Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi. Maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/kep.58-Org/I/2020 tanggal 5 maret 2020 tentang tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi.

Capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	persen	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi tahun 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 100 Persen, sementara realisasi mencapai 100 Persen maka capaian kinerja tahun 2020 atas indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi sebesar 100 persen, maka capaian Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 telah tercapai. Dengan demikian sebanyak 44 perangkat daerah di Kota Bekasi telah menerapkan Reformasi Birokrasi, hal tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 dapat mempertahankan capaian kinerja.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Penekanan yang diberikan oleh Wali Kota agar kepala perangkat daerah terlibat dan mengerti dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Pendampingan yang dilakukan pada tiap-tiap perangkat daerah dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) atau workshop;

3. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bekasi;
4. Menunjuk Agen Perubahan dalam rangka optimalisasi manajemen pemerintahan untuk menciptakan dan menggerakkan birokrasi pemerintahan yang professional di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.165-Org/III/2020 tentang Agen Perubahan Pada Pemerintah Kota Bekasi
5. Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong pelaksanaan RB;
6. Perbaiki kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan peran Inspektorat selain sebagai unsur pengawas, tetapi juga harus memberikan masukan/ wawasan kepada seluruh perangkat daerah.

Pencapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3-3
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi
Birokrasi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020 (Persen)
1.	Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	Persen	100	100	100
2.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100

Sumber : Data Bagian Organisasi dan Bagian Hukum tahun 2020, Diolah

Dengan melihat capaian 2 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang

menerapkan Reformasi Birokrasi. Adapun capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi tahun 2020 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-4
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		
		2019	2020	2023
Target	Persen	100	100	100
Realisasi	Persen	100	100	-

Sumber : Data Olahan Bagian Tata Usaha, Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 sebesar 100% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Namun jika melihat trend kenaikan nilai indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator sasaran RPJMD selama 4 tahun terakhir yaitu :

Tabel 3-5
Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	58.08	62.86	64.36	65.05

Gambar 3-1
Grafik Data Perkembangan Nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Kota Bekasi



Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahun dalam rangka pembinaan penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah menunjukkan peningkatan kualitas. Namun demikian kedepan masih harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan persentase penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah dan Peningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah terkait agar dapat mendukung pencapaian indeks Reformasi Birokrasi sesuai Target Akhir Renstra 2018-2023 yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 060/1504/SETDA.Org tanggal 2 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, yang isinya:

- a. Menyusun rencana aksi reformasi perangkat daerah sesuai dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi;
- b. Membangun tim reformasi birokrasi dan agen perubahan yang dapat mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Melaporkan rencana aksi reformasi birokrasi, tim reformasi birokrasi dan agen perubahan perangkat daerah tahun 2020

kepada Wali Kota Bekasi melalui Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-5
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	635.605.976	71.476.000	11,24	100	88,76
Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi		30.000.000	5,400,000	18			
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		-	-	-			
Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2020		21,194,000	20,862,800	98,44			
Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah		60.000.000	16,400,640	27.33			
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan		-	-	-			
Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		65,385,000	17,792,000	47.72			
Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota		-	-	-			
Penyusunan Peta Proses Bisnis		-	-	-			
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah		20,000,000	7,950,000	39.75			

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	0	0	0		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 10 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi dimana pagu anggaran sebesar Rp.635.605.976,00 (*Enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 71.476.000,00 (*Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi hanya mencapai 11,24 persen. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi sebesar 100 persen dari target kinerja 100 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 88,76 persen karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3-6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Persen	100	100	100

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda, diolah

2. Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan skor hasil EKPPD harus didukung dengan peningkatan capaian masing-masing IKK, dan diperhitungkan pada target RPJMD untuk memperoleh peningkatan skor dari 3.219 pada tahun 2019 menjadi 3.254 pada tahun 2020, maka diperkirakan harus ada 38 persen capaian IKK meningkat. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-7
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	persen	38	65,52	172,42%

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan, 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 38 Persen, sementara realisasi mencapai 65,52 Persen maka capaian kinerja tahun 2020 atas Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2020 sebesar 172,42 persen,

dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2020 telah terlampaui dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada IKK 2.1 (tataran pengambil kebijakan) Terdapat 22 Indikator kinerja kunci yang meningkat pada tahun 2020 dari 41 IKK yang ada.
- b. Pada IKK 2.2 (tataran pelaksana kebijakan) tidak terdapat kenaikan karena target hanya pemenuhan data 2.2 IKK.
- c. Pada IKK 2.3 (tataran pelaksana kebijakan) aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan) terdapat 24 IKK yang meningkat dari 46 IKK yang ada.

Dikarenakan pada tahun 2020 ini terdapat perubahan Indikator Kinerja Kunci yang semula sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, menjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka yang dipergunakan sebagai pembanding adalah IKK-IKK yang masih sama dengan IKK yang di pergunakan pada tahun 2018 dengan rincian IKK 2.1 sebanyak 41 IKK dan IKK 2.3 sebanyak 46 IKK.

Terlampauinya target indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat ini, tentunya mendukung kepada peningkatan nilai EKPPD tahun 2020 dimana Kota Bekasi pada tahun 2020 ini memperoleh skor 3,6812 poin dari target tahun 2020 sebesar 3,254 poin. Skor yang diperoleh tahun 2020 ini sekaligus menobatkan Kota Bekasi berada pada peringkat 10 tingkat regional Jawa Barat, dimana pada tahun 2019 Kota Bekasi berada pada peringkat 15 tingkat regional Jawa Barat.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi teknis penyusunan sekaligus penyampaian form dan pengisian IKK untuk diisi oleh masing Perangkat Daerah;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki data utama seperti Data Keuangan dan Aset dengan BPKAD, data Kepegawaian dengan BKPPD, dan program perencanaan

Pembangunan dengan Bappeda, data kependudukan dengan Dispendukcapil agar tidak terjadi kerancuan data saat pengisian Indikator Kinerja Kunci;

- c. Melakukan desk terhadap data IKK pada setiap Perangkat Daerah karena setiap data IKK yang di isikan harus ada data pendukungnya;

Pencapaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif sebagai berikut:

Tabel 3-8
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2019
1.	Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik	Persen	25	65,52	262,08

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan tahun 2020, Diolah

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat di tahun 2020. Capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat tahun 2020 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-9
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2019	2023
Target	Persen	38	40
Realisasi	Persen	65,52	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2020 sebesar 65,52% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 40%, maka Sekretariat

Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Capaian IKK yang meningkat pada perangkat daerah dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan melakukan penjagaan atas data-data capaian IKK.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat Kota Bekasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-10
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	87.030.000	78.129.000	89,77	172,42	82,65
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018	87.030.000	78.129.000	89,77		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat, dimana pagu anggaran sebesar Rp.87.030.000,00 (*delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 78.129.000,00 (*tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Capaian IKK yang meningkat hanya mencapai 89,77 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian

IKK sebesar 65,52 persen dari target sebesar 38 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 172,42 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 82,65 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3-11
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	65,74	65,52

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2020, diolah

3. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 11 (sebelas) unit layanan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-12
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	83,37	104,21%

Sumber: SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target nilai IKM Sekretariat Daerah pada tahun 2020 sebesar poin, sementara realisasi mencapai 83,37 poin, maka capaian kinerja tahun 2020 atas indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sebesar 104,21 persen, maka capaian indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020 telah terlampaui.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2020 terhadap 11 Unit layanan publik di lingkungan

Sekretariat Daerah, sebanyak 10 unit layanan publik (90.9%) mempunyai nilai IKM baik dan 1 unit layanan publik (9%) mempunyai nilai SKM Sangat baik. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-13
Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

NO	UNSUR PELAYANAN/ BAGIAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	Tata Usaha	84.41	Baik
2	Organisasi	81.29	Baik
3	Pembangunan	80.53	Baik
4	Perekonomian	89.38	Sangat Baik
5	Tata Pemerintahan	86.66	Baik
6	Hukum	79.33	Baik
7	Pengadaan Barang dan Jasa	86.04	Baik
8	Perlengkapan	80.52	Baik
9	Hubungan Masyarakat	79.64	Baik
10	Kesejahteraan Sosial	81.40	Baik
11	Kerjasama	87.83	Baik
Nilai Rata-rata Capaian SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi		83,37	Baik

Sumber : SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari petugas pelayanan dari dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi;
2. Asistensi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat juga difasilitasi melalui Grup Whatsapp. Dengan adanya Grup Whatsapp, seluruh peserta mendapat arahan teknis tentang pelaksanaan survey dengan lebih cepat serta progress yang dicapai sesuai tahapan survey dapat dipantau oleh Bagian Organisasi;

- Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkala dan intensif oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-14
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Nilai IKM

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Porsentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	Persen	100	100	100
2.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100
4.	Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
5.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	Persen	70	100	142,85
6.	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya	Persen	100	77	77

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020, Diolah

Dengan melihat capaian indikator program rata-rata tercapai kecuali untuk indikator Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya yang hanya tercapai 77 persen dimana ini sebagai dampak dari wabah pandemi covid-19 dimana penyelenggaraan event yang mengumpulkan masa sangat dibatasi, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-15
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai IKM Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2020	2023
Target	Nilai	80	83
Realisasi	Nilai	83,37	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2019

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator nilai IKM pada tahun 2020 sebesar 83,37 poin dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 83,00 poin, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di Sekretariat Daerah memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- c. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).
- d. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala dan intensif oleh Bagian Organisasi dimulai memperbaiki layanan dengan indeks layanan terendah.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM Sekretariat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-16
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Nilai IKM

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai IKM	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	640,277,000	243,267,000	37,99	83,37	45,38
		Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	20,000,000	7,950,000	39,75		
		Penyelenggaraan Keprotokolan	-	-	-		
		Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-		
		Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	150,000,000	51,080,000	34,05		
		Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan SISMONTEPRA Kota Bekasi	82,927,000	81,747,000	98,57		
		Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020	50,000,000	44,200,000	88,4		
		Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	337,350,000	58,290,000	15,45		
		Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	-	-	-		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2019, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 8 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai IKM, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 640,277,000,00 (*Enam ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 243,267,000,00 (*Dua ratus empat puluh*

tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM hanya mencapai 37,99 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai IKM sebesar 83,37 poin dari target nilai sebesar 80 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 104,21 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 37,99 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 45,38 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

Tabel 3-17
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,07	83,37

Sumber : Data hasil SKM Setda tahun 2020, diolah

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat kenaikan capaian kinerja dari 83,07 pada tahun 2019 menjadi 83,37 pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 0,3. Indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sekretariat Daerah dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk mendongkrak menerapkan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah untuk mencapai kinerja penerapan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3-18
Perbandingan IKM Setda dengan OPD lain

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KET
1	Badan Pendapatan Daerah	76.93	Baik	
2	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	77.85	Baik	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84.72	Baik	

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KET
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	84.97	Baik	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.13	Baik	
6	Dinas Pendidikan	77.28	Baik	
7	Dinas Kesehatan	79.85	Baik	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.81	Baik	
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	81.24	Baik	
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	81.66	Baik	
11	Dinas Lingkungan Hidup	76.67	Baik	
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	78.43	Baik	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.16	Baik	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.38	Baik	
15	Dinas Tenaga Kerja	82.80	Baik	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	80.95	Baik	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.46	Baik	
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	83.58	Baik	
19	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	82.14	Baik	
20	Dinas Tata Ruang	77.68	Baik	
21	Dinas Perhubungan	80.28	Baik	
22	Dinas Pemadam Kebakaran	84.74	Baik	
23	Dinas Sosial	80.53	Baik	
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	76.85	Baik	
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	77.04	Baik	
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	84.06	Baik	
27	RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid	89.76	Sangat Baik	
28	Inspektorat Daerah	80.16	Baik	
29	Sekretariat Daerah	83.87	Baik	
30	Sekretariat DPRD	84.02	Baik	
31	Satuan Polisi Pamong Praja	85.29	Baik	
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.23	Kurang Baik	
33	Kecamatan Bekasi Barat	80.47	Baik	
34	Kecamatan Bekasi Selatan	80.82	Baik	
35	Kecamatan Bekasi Utara	81.74	Baik	
36	Kecamatan Bekasi Timur	82.82	Baik	
37	Kecamatan Medansatria	82.03	Baik	
38	Kecamatan Mustikajaya	82.25	Baik	
39	Kecamatan Rawalumbu	82.79	Baik	
40	Kecamatan Bantargebang	81.61	Baik	
41	Kecamatan Jatisampurna	85.09	Baik	

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KET
42	Kecamatan Jatiasih	78.70	Baik	
43	Kecamatan Pondokmelati	86.47	Baik	
44	Kecamatan Pondokgede	80.97	Baik	
45	RSUD Kelas D Jatisampurna	88.51	Sangat Baik	
46	RSUD Kelas D Bantargebang	87.08	Baik	
47	RSUD Kelas D Pondokgede	88.74	Sangat Baik	
48	Puskesmas Seroja	78.63	Baik	
49	Puskesmas Kaliabang Tengah	84.66	Baik	
50	Puskesmas Teluk Pucung	78.70	Baik	
51	Puskesmas Pejuang	81.88	Baik	
52	Puskesmas Kotabaru	82.33	Baik	
53	Puskesmas Bintara	79.96	Baik	
54	Puskesmas Bintarajaya	83.23	Baik	
55	Puskesmas Kranji	81.70	Baik	
56	Puskesmas Rawatembaga	79.86	Baik	
57	Puskesmas Margamulya	79.05	Baik	
58	Puskesmas Margajaya	79.61	Baik	
59	Puskesmas Pekayonjaya	77.58	Baik	
60	Puskesmas Jakamulya	81.08	Baik	
61	Puskesmas Karangkitri	83.48	Baik	
62	Puskesmas Bojong Rawalumbu	80.30	Baik	
63	Puskesmas Pengasinan	82.48	Baik	
64	Puskesmas Arenjaya	85.34	Baik	
65	Puskesmas Wisma Jaya / Bekasi Jaya	82.35	Baik	
66	Puskesmas Pondokgede	77.50	Baik	
67	Puskesmas Jatirahayu	81.55	Baik	
68	Puskesmas Jatiwarna	80.02	Baik	
69	Puskesmas Jatimakmur	87.83	Baik	
70	Puskesmas Jatibening	82.88	Baik	
71	Puskesmas Jatisampurna	80.12	Baik	
72	Puskesmas Jatiasih	85.88	Baik	
73	Puskesmas Jatiluhur	84.30	Baik	
74	Puskesmas Bantargebang	79.50	Baik	
75	Puskesmas Bojongmenteng	82.38	Baik	
76	Puskesmas Durenjaya	85.16	Baik	
77	Puskesmas Mustikajaya	82.29	Baik	
78	Puskesmas Harapan Baru	81.54	Baik	
79	Puskesmas Padurenan	80.61	Baik	
80	Puskesmas Perwira	84.93	Baik	
81	Puskesmas Jatiranggon	78.84	Baik	
82	Puskesmas Cimuning	79.99	Baik	
83	Puskesmas Kalibaru	84.03	Baik	
84	Puskesmas Ciketing Udik	84.94	Baik	
85	Puskesmas Jakasetia	79.75	Baik	
86	Puskesmas Perumnas II	78.18	Baik	

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KET
87	Puskesmas Sumurbatu	93.97	Sangat Baik	
88	Puskesmas Mustikasari	83.28	Baik	
89	Puskesmas Jatibening Baru	80.84	Baik	
	Nilai rata-rata capaian IKM Kota Bekasi	81.96	Baik	

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah

4. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas).

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk merngetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah Maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Adapun capaian indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-18
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	persen	45	100	222.22

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2020, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 45 Persen, sementara realisasi mencapai 100 Persen maka capaian kinerja tahun 2020 atas Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) sebesar 222.22 persen, maka capaian Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) pada Tahun 2019 telah terlampaui. Dengan demikian pada tahun 2020 sebanyak 44 perangkat daerah di Kota Bekasi telah mendapatkan nilai AKIP minimal B.

Adapun rekapitulasi perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3-19
Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL	
		NILAI	TINGKAT AKUNTABILITAS
1	SETDA	79,66	BB
2	SETWAN	77,23	BB
3	ITKO	84,18	A
4	BAPENDA	79,88	BB
5	BAPPEDA	81,47	A

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL	
		NILAI	TINGKAT AKUNTABILITAS
6	BKPPD	78,52	BB
7	BPBD	72,39	BB
8	BPKAD	85,67	A
9	DINAS DAMKAR	71,26	BB
10	DBMSDA	77,12	BB
11	DISARPUSDA	78,10	BB
12	DINKES	80,61	A
13	DINSOS	75,40	BB
14	DINAS LH	76,24	BB
15	DISDAGPERIN	73,43	BB
16	DISDIK	78,12	BB
17	DISHUB	78,59	BB
18	DKPPP	65,70	B
19	DISKOMINFO	78,08	BB
20	DISKOPUKM	74,84	BB
21	DISNAKER	77,11	BB
22	DISPARBUD	71,54	BB
23	DISPERKIMTAN	78,42	BB
24	DISPORA	74,56	BB
25	DISTARU	78,58	BB
26	DP3A	74,39	BB
27	DPMPSTP	83,63	A
28	DPPKB	73,08	BB
29	DISDUKCAPIL	78,23	BB
30	KEC.BANTARGEBAWANG	75,55	BB
31	KEC. BEKASI BARAT	72,26	BB
32	KEC. BEKASI SELATAN	76,02	BB
33	KEC.BEKASI TIMUR	74,81	BB
34	KEC. BEKASI UTARA	72,51	BB
35	KEC.JATIASIH	77,28	BB
36	KEC.JATISAMPURNA	74,01	BB
37	KEC.MEDANSATRIA	75,69	BB
38	KEC.MUSTIKAJAYA	75,22	BB
39	KEC.PONDOKGEDE	74,71	BB
40	KEC. PONDOKMELATI	73,33	BB
41	KEC. RAWALUMBU	73,43	BB
42	BADAN KESBANGPOL	76,27	BB
43	RSUD	88,04	A
44	SATPOL PP	75,52	BB

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2020,
 Diolah

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) pada tahun 2020 dapat mempertahankan capaian kinerja.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memastikan seluruh target kinerja diturunkan ke level Perangkat Daerah
- b. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu untuk seluruh Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- d. Melakukan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- f. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu sebagai dasar penentuan tunjangan tambahan penghasilan;
- g. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (performance based organization);
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) sehingga jauh

melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif sebagai berikut:

Tabel 3-20
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi
Birokrasi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	65,22	100	153,33

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020, Diolah

Ketercapaian atas indikator program Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebagaimana tabel diatas, dimana capaian kinerja tahun 2020 terlampaui sebesar 153,33 persen berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas). Ketercapaian atas indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) ini juga akan mendorong kepada peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti yang terjadi pada tahun lalu yaitu dari 63,49 pada tahun 2018 menjadi 66,28 pada tahun 2019. Namun nilai AKIP Kota Bekasi tahun 2020 dari KemenPANRB sampai saat diselesaikannya penyusunan LKIP ini belum juga terbit, tetapi kami optimis bahwa nilai AKIP Kota Bekasi tahun 2020 akan mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Cascade Indikator Kinerja Individu dimana dipetakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab eselon II, III, IV dan Pelaksana, dimana indikator kinerja individu tersebut di sinkronkan dengan sasaran kinerja pegawai dan menjadi ukuran dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Dengan demikian setiap

individu pegawai memiliki kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023

2. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi berhasil menintegrasikan 6 (enam) Aplikasi kinerja yang terdiri dari SIENCANG (Perencanaan/Bappelitbangda), SIMDA (Keuangan/BPKAD), e-MONEV (Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan/ Bappelitbangda), SIMPELBANG (Monev Tepra/ Bagian Pembangunan SETDA), e-SAKIP (SAKIP/ Bagian Tata Pemerintahan SETDA) dan SIKERJA (Kinerja Harian Pegawai/ BKPPD) dimana keenam aplikasi tersebut akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi kinerja perangkat daerah dan individu pegawai dalam mencapai indikator RPJMD dan Renstra.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada level Perangkat Daerah, level Inspektorat Daerah hingga Bappelitabangda. Pada level Perangkat Daerah dikembangkan budaya kontrol tiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi. Pada level Inspektorat titik berat evaluasi bukan hanya pada aspek asses tetapi lebih kepada asist agar kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah menjadi lebih baik lagi. Pada level Bappelitbangda pola perencanaan bukan hanya didasarkan pada tahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, tetapi juga memperhatikan capaian kinerja sesuai dengan laporan kinerja yang telah dibuat perangkat daerah dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat

Capaian Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) tahun 2020 bila dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-21
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)
terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	
		2020	2023
Target	Persen	45	83
Realisasi	Persen	100	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 83 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus meningkatkan target kinerja dengan mengajukan perubahan target pada indikator program di RPJMD dan Target Indikator Sasaran di Renstra.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-22
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	19,200,000	19,011,000	99,01	222,22	84,43
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018	19,200,000	19,011,000	99,01		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas), dimana pagu anggaran sebesar Rp. 19,200,000,00 (*Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 19,011,000,00 (*Sembilan belas juta sebelas ribu Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) mencapai 99,01 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) sebesar 100 persen dari target sebesar 45 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 2223,22 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 84,43 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3-23
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	Persen	100	100

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2020, diolah

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD

5. Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat.

Dalam menilai tingkat kesehatan BUMD, Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggunakan Formulasi penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah yang tercantum dalam

Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. Formulasi ini digunakan untuk melakukan penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Formulasi ini disusun dengan menggunakan metode Balance Score Card. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMD, yang meliputi penilaian:

- a. Aspek Keuangan diambil berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan;
- b. Aspek Operasional diambil berdasarkan indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, serta *learning and growth*; dan
- c. Aspek Administrasi.

Untuk mencapai indikator Persentase BUMD dalam kondisi sehat Maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melakukan pembinaan BUMD yang ada di kota bekasi yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan terhadap ketiga aspek tersebut Didapatkan hasil sebagaimana berikut:

Tabel 3-24
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi

No	PDAM	Opini KPA	KATEGORI	Ket
1	PDAM Tirta Bhagasasi	WTP	Sehat	
2	PDAM Tirta Patriot	Wajar	Sehat	
3	PT. Sinergi Patriot	Wajar	Sehat	
4	BPRS Syariah Patriot	Wajar	Sehat	
5	PD Migas	-	Kurang Sehat	Audit KPA baru selesai April minggu ke 2
6	PD Mitra Patriot	Disclaiamer	Kurang Sehat	

Sumber : Laporan Akhir Pengendalian dan Evaluasi BUMD, Diolah

Dengan demikian pada tahun 2020 hanya sebanyak 4 BUMD dari 6 BUMD di Kota Bekasi mendapatkan predikat Sehat. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase BUMD dalam kondisi sehat dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 3-25
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD
dalam kondisi sehat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	persen	100	66,67	66,67

Sumber: Bagian Perekonomian tahun 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 100 Persen, sementara realisasi hanya mencapai 66,67 Persen maka capaian kinerja tahun 2020 atas Persentase BUMD dalam kondisi sehat hanya 66,67 persen, maka capaian Persentase BUMD dalam kondisi sehat pada Tahun 2020 tidak berhasil mencapai target target.

Adapun faktor penyebab kegagalan pencapaian target Tahun 2020 adalah karena Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. Hambatan yang dihadapi oleh BUMD dalam mendongkrak kinerja pemerintah daerah antara lain :

- a. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD baik masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan dengan tingkat persaingan

- yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.
- b. Marketing system yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah;
 - c. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis;
 - d. Kurang berfungsinya Badan Pengawas;
 - e. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi Debt to Equity Ratio yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan relatif tinggi;
 - f. Kurangnya Inovasi untuk menunjang daya saing yang kuat
 - g. Keterbatasan sumber permodalan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dari sisi pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya;
 - h. Belum tersusunnya regulasi yang lengkap dan memadai berkaitan dengan pemberian pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan BUMD dalam melakukan aksinya guna pemenuhan tuntutan masyarakat;
 - i. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD sehingga pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat mengalami keterbatasan;
 - j. Daya saing BUMD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dunia bisnis swasta murni. Hal ini sebagai akibat dari kurang fleksibilitasnya aksi korporasi dalam menghadapi persaingan jika dibandingkan dengan bisnis swasta;
 - k. Aset perusahaan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai akibat dari regulasi maupun dari kemampuan SDM BUMD itu sendiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya pemeliharaan, sehingga mengurangi tingkat keuntungan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu diambil langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
- b. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan BUMD;
- c. Ekspansi dan Diversifikasi Usaha;
- d. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- e. Perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD
- f. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence)

Tabel 3-26
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase BUMD dalam kondisi sehat

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Jumlah BUMD yang sehat	Jumlah BUMD	6	4	66,67%
2.	Persentase Peningkatan Dividen BUMD	persen	2	3,79%	189,5%

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020, Diolah

Dengan melihat capaian 2 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat tidak memenuhi target, berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase BUMD dalam kondisi sehat. Adapun capaian indikator Persentase BUMD dalam kondisi sehat tahun 2020 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-27
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase BUMD dalam kondisi sehat terhadap Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	
		2019	2023
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	66,67	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat pada tahun 2020 hanya tercapai 66,67 persen jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-28
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Persentase BUMD dalam kondisi sehat

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD	-	-	-	66,67	66,67
		Pengendalian dan Evaluasi BUMD	-	-	-		
		Penyusunan Kajian BUMD Persampahan	-	-	-		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat, dimana pagu

anggaran semula dianggarkan sebesar Rp.280,000,000,00 (*Dua ratus delapan ribu Rupiah*) namun terkoreksi pada refocusing anggran terkait Covid-19 sehingga anggaran untuk mendukung ketercapain indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat menjadi sebesar Rp. 0 (*Nol*).

Jika dikaitkan dengan capaian BUMD dalam kondisi sehat hanya sebesar 66,67 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja hanya sebesar 66,67 persen, maka dapat dianggap wajar mengingat tidak ada anggaran yang dialokasikan yang menunjang pencapaian indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat. Walau demikian Sekretariat Daerah akan terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dengan atau tanpa dukungan anggaran yang maksimal.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3-29
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	Persen	50	66,67

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2020, diolah

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 85,575,010,100,- pada penetapan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 7 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-30
Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.750.975.000,00	23.273.681.020,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.294.035.100,00	20.859.450.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	775.000.000,00	445.000.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	0,00
5	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	18.850.000.000,00	13.092.367.000,00
6	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	280.000.000,00	0,00
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	11.475.000.000,00	8.353.317.610,00
	TOTAL	85.575.010.100,00	66.023.815.630,00

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2020, diolah

Total anggaran Sekretariat Daerah berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 66,023,317,610,- dengan realisasi sebesar Rp.58,279,356,766,- (88,27%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-31
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Setelah P-APBD Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.273.681.020,00	21.760.656.293,00	93,50 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.859.450.000,00	18.352.786.532,00	87,98 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	445.000.000,00	439.180.000,00	98,69 %

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00 %
5.	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	13.092.367.000,00	9.445.397.441,00	72,14 %
6.	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	0,00	0,00	0,00 %
7.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	8.353.317.610,00	8.281.336.500,00	99,14 %
	TOTAL	66.023.815.630,00	58.279.356.766,00	88,27 %

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020

Penyerapan anggaran sebesar 88,27% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

Tabel 3-32
Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.273.681.020
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.550.300.020
4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	385.856.000
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	360.000.000
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330.000.000
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.225.000.000
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.000.000.000
4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12.500.525.000
4.01.4.01.03.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	162.000.000
4.01.4.01.03.01.31	Penataan Arsip	0
4.01.4.01.03.02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	20.859.450.000
4.01.4.01.03.02.12	Penyediaan Ruang Kerja	1.041.350.000
4.01.4.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	230.000.000
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000.000
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.070.000.000
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	0
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.418.100.000
4.01.4.01.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100.000.000
4.01.4.01.03.03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	445.000.000
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170.000.000
4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	125.000.000
4.01.4.01.03.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150.000.000
4.01.4.01.03.05	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
4.01.4.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0
4.01.4.01.03.29	5. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	13.092.367.000
4.01.4.01.03.29.01	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	20.000.000
4.01.4.01.03.29.02	Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	0
4.01.4.01.03.29.03	Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60.000.000
4.01.4.01.03.29.04	Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota	0
4.01.4.01.03.29.05	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	0
4.01.4.01.03.29.06	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150.000.000
4.01.4.01.03.29.07	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi (PRODESKEL)	0
4.01.4.01.03.29.08	Sinergitas Instansi Vertikal	0
4.01.4.01.03.29.11	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	0

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.29.12	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0
4.01.4.01.03.29.13	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	0
4.01.4.01.03.29.14	Monitoring dan Evaluasi K3	0
4.01.4.01.03.29.53	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	240.000.000
4.01.4.01.03.29.56	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2020	21.194.000
	Penyelenggaraan Penilaian RW Siaga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	273.600.000
4.01.4.01.03.29.09	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019	19.200.000
4.01.4.01.03.29.10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2019	87.030.000
4.01.4.01.03.29.15	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	0
4.01.4.01.03.29.16	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	0
4.01.4.01.03.29.17	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0
4.01.4.01.03.29.18	Penyusunan Peta Proses Bisnis	0
4.01.4.01.03.29.55	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	30.000.000
4.01.4.01.03.29.19	Penyusunan Dokumen Perencanaan	54.526.000
4.01.4.01.03.29.20	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	150.000.000
4.01.4.01.03.29.21	Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000
4.01.4.01.03.29.22	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0
4.01.4.01.03.29.23	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0
4.01.4.01.03.29.24	Penyelenggaraan Keprotokolan	0
4.01.4.01.03.29.25	Penyelenggaraan KOMDA HIV / AIDS	0
4.01.4.01.03.29.26	Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1.052.690.000
4.01.4.01.03.29.27	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	150.000.000
4.01.4.01.03.29.28	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	0
4.01.4.01.03.29.29	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari jadi Kota Bekasi	377.350.000
4.01.4.01.03.29.30	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	364.050.000
4.01.4.01.03.29.31	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	0
4.01.4.01.03.29.32	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	700.000.000
4.01.4.01.03.29.57	Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bekasi	250.000.000
4.01.4.01.03.29.33	Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	2.865.000.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.29.34	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2020	0
4.01.4.01.03.29.35	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	50.000.000
4.01.4.01.03.29.54	Pengendalian Pembangunan	82.927.000
4.01.4.01.03.29.36	Pengendalian Inflasi Daerah	73.040.000
4.01.4.01.03.29.37	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	60.000.000
4.01.4.01.03.29.38	Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	50.000.000
4.01.4.01.03.29.39	Penyusunan Naskah Kerja Sama	0
4.01.4.01.03.29.40	Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	0
4.01.4.01.03.29.41	Pembinaan Kehumasan	0
4.01.4.01.03.29.42	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	210.400.000
4.01.4.01.03.29.43	Pembutan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	371.500.000
4.01.4.01.03.29.44	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.000.000
4.01.4.01.03.29.45	Penyebarnya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2.500.000.000
4.01.4.01.03.29.46	Penyelenggaraan penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	39.600.000
4.01.4.01.03.29.47	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	150.000.000
4.01.4.01.03.29.48	Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	178.080.000
4.01.4.01.03.29.49	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	0
4.01.4.01.03.29.50	Surveillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO	0
4.01.4.01.03.29.51	Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	0
4.01.4.01.03.29.52	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	243.180.000
4.01.4.01.03.32	6. Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	-
4.01.4.01.03.32.01	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	0
4.01.4.01.03.32.02	Penyusunan kajian BUMD Persampahan	0
4.01.4.01.03.34	7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	8.353.317.610
4.01.4.01.03.34.01	Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	114.360.000
4.01.4.01.03.34.02	Pengadaan Sarana Mobilitas	4.200.000.000
4.01.4.01.03.34.03	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	123.215.000
4.01.4.01.03.34.04	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	2.543.556.210
4.01.4.01.03.34.05	Pengadaan Meubelair	946.854.600
4.01.4.01.03.34.09	Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	287.331.800

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.34.06	Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	0
4.01.4.01.03.34.07	Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	0
4.01.4.01.03.34.08	Penyediaan Tiang Umbul-umbul, Umbul-umbul, Vitrase dan Tiang Bendera	138.000.000
JUMLAH		66.023.815.630

3.4 Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3-33
Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
1	27 Januari 2020	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
2	25 April 2020	Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Status Kinerja Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2018	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3	27 Agustus 2020	Penghargaan Top Pembina BUMD 2020 Atas	BUMD
4	03 Desember 2020	Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2020 Tingkat Jawa Barat Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
5	07 Desember 2020	Penghargaan Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6	26 November 2020	Penghargaan Wali Kota Terpopuler di Media Digital 2020	Jakarta

Sumber: Data Bagian Humas, 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis sebagai upaya pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju penyelenggaraan *good governance* Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2020.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan nilai yang cukup berhasil karena capaian rata-

rata 133,34% dari target, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan stakeholder.

4.1 kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2020, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. Rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 133,34%;
2. Capaian dari IKU tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4-1
Capaian dari IKU tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100	100
2	Persentase Capaian IKK yang meningkat	38	65,52
3	Nilai IKM	80	83,37
4	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	45	100
5	Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	100	66.67

Dari lima IKU tahun 2020 terdapat satu indikator dengan capaian kinerja dibawah target yang telah ditetapkan yaitu Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat dengan capaian kinerja 66,67% dari target 100%

3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pada tahun 2020 yakni dari 88,27%.

4.2 Rencana Tindak

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terhadap indikator yang belum berhasil yaitu Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat akan dilakukan upaya-upaya antara lain Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis serta peningkatan capaian Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence) dan upaya-upaya lain dalam rangka peningkatan kinerja BUMD.

5 LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : Dr. Hj. RENY HENDRAWATI M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RAHMAT EFFENDI

Jabatan : WALI KOTA BEKASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target sasaran kinerja sesuai lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I :
 - a. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
 - b. Belanja Langsung Urusan (BLU)
2. Lampiran II : Melakukan progress kebijakan pada lampiran I, lampiran a dan b berdasarkan progress per triwulan. Jika itu adalah belanja dan acuan sama dengan tugas sebagai dinas penghasil.

Sasaran kinerja berdasarkan lampiran 1 dan 2 akan di evaluasi setiap tiga (3) bulan oleh tim Dalev yang dibentuk oleh Wali Kota Bekasi, jika kegiatan pada lampiran tersebut berdasarkan laporan hasil tim tidak dapat memenuhi capaian dan keberhasilan maka saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya dan tidak akan melakukan gugatan secara hukum.

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Bekasi, 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Hj. RENY HENDRAWATI M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 199011 2 002

Lampiran I : Sasaran Strategis/ Program Sekretariat Daerah Kota Bekasi

(RENJA APBD TA 2020)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menerapkan Reformasi Birokrasi.	100%
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	38%
		Nilai IKM	80
2	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke atas)	45%
3	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD yang sehat	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 27,595,975,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 26,294,035,100	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 650,000,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100,000,000	
5	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Rp 18,700,000,000	
6	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	Rp 280,000,000	
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Rp 11,475,000,000	
JUMLAH ANGGARAN		Rp 83,275,010,100	

Bekasi, 2 Januari 2020
 SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Hj. RENY HENDRAWATI M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650205 199011 2 002

Lampiran II : Alokasi Kegiatan Per Triwulan

NO	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 27,695,975,000	Rp 5,519,195,000	Rp 11,038,390,000	Rp 8,278,792,500	Rp 2,769,597,500	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,000,000.00	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Rp 1,500,000	Rp 500,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7,000,000,000.00	Rp 1,400,000,000	Rp 2,800,000,000	Rp 2,100,000,000	Rp 700,000,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1,183,650,000.00	Rp 236,730,000	Rp 473,460,000	Rp 355,095,000	Rp 118,365,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 500,000,000.00	Rp 100,000,000	Rp 200,000,000	Rp 150,000,000	Rp 50,000,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 360,000,000.00	Rp 72,000,000	Rp 144,000,000	Rp 108,000,000	Rp 36,000,000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 250,000,000.00	Rp 50,000,000	Rp 100,000,000	Rp 75,000,000	Rp 25,000,000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 3,600,000,000.00	Rp 720,000,000	Rp 1,440,000,000	Rp 1,080,000,000	Rp 360,000,000	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 2,841,325,000.00	Rp 568,265,000	Rp 1,136,530,000	Rp 852,397,500	Rp 284,132,500	
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp 11,319,000,000.00	Rp 2,263,800,000	Rp 4,527,600,000	Rp 3,395,700,000	Rp 1,131,900,000	
13	Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 162,000,000.00	Rp 32,400,000	Rp 64,800,000	Rp 48,600,000	Rp 16,200,000	
14	Penataan Arsip	Rp 75,000,000.00	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000	Rp 22,500,000	Rp 7,500,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 26,294,035,100	Rp 5,258,807,020	Rp 10,517,614,040	Rp 7,888,210,530	Rp 2,629,403,510	
1	Penyediaan Ruang Kerja	Rp 891,350,000.00	Rp 178,270,000	Rp 356,540,000	Rp 267,405,000	Rp 89,135,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp 230,000,000.00	Rp 46,000,000	Rp 92,000,000	Rp 69,000,000	Rp 23,000,000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 22,395,345,100.00	Rp 4,479,069,020	Rp 8,958,138,040	Rp 6,718,603,530	Rp 2,239,534,510	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Rp 1,427,340,000.00	Rp 285,468,000	Rp 570,936,000	Rp 428,202,000	Rp 142,734,000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Rp 250,000,000.00	Rp 50,000,000	Rp 100,000,000	Rp 75,000,000	Rp 25,000,000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 200,000,000	Rp 400,000,000	Rp 300,000,000	Rp 100,000,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Rp 100,000,000.00	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000	Rp 30,000,000	Rp 10,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 650,000,000	Rp 130,000,000	Rp 260,000,000	Rp 195,000,000	Rp 65,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 500,000,000.00	Rp 100,000,000	Rp 200,000,000	Rp 150,000,000	Rp 50,000,000	
3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 40,000,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 100,000,000.00	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000	Rp 30,000,000	Rp 10,000,000	
	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Rp 18,700,000,000.00	Rp 3,740,000,000.00	Rp 7,480,000,000.00	Rp 5,610,000,000.00	Rp 1,870,000,000.00	

NO	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Trivulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	Rp 1,280,000,000.00	Rp 256,000,000	Rp 512,000,000	Rp 384,000,000	Rp 128,000,000	
27	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	Rp 800,000,000.00	Rp 160,000,000	Rp 320,000,000	Rp 240,000,000	Rp 80,000,000	
28	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	Rp 200,000,000.00	Rp 40,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000	Rp 20,000,000	
29	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari jadi Kota Bekasi	Rp 400,000,000.00	Rp 80,000,000	Rp 160,000,000	Rp 120,000,000	Rp 40,000,000	
30	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	Rp 400,000,000.00	Rp 80,000,000	Rp 160,000,000	Rp 120,000,000	Rp 40,000,000	
31	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Rp 800,000,000.00	Rp 160,000,000	Rp 320,000,000	Rp 240,000,000	Rp 80,000,000	
32	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	Rp 700,000,000.00	Rp 140,000,000	Rp 280,000,000	Rp 210,000,000	Rp 70,000,000	
33	Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	Rp 1,700,000,000.00	Rp 340,000,000	Rp 680,000,000	Rp 510,000,000	Rp 170,000,000	
34	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) tahun 2020	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
35	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	Rp 50,000,000.00	Rp 10,000,000	Rp 20,000,000	Rp 15,000,000	Rp 5,000,000	
36	Pengendalian Inflasi Daerah	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
37	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	Rp 400,000,000.00	Rp 80,000,000	Rp 160,000,000	Rp 120,000,000	Rp 40,000,000	
38	Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	Rp 50,000,000.00	Rp 10,000,000	Rp 20,000,000	Rp 15,000,000	Rp 5,000,000	
39	Penyusunan Naskah Kerja Sama	Rp 50,000,000.00	Rp 10,000,000	Rp 20,000,000	Rp 15,000,000	Rp 5,000,000	
40	Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	Rp 30,000,000.00	Rp 6,000,000	Rp 12,000,000	Rp 9,000,000	Rp 3,000,000	
41	Pembinaan Kehumasan	Rp 200,000,000.00	Rp 40,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000	Rp 20,000,000	
42	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	Rp 200,000,000.00	Rp 40,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000	Rp 20,000,000	
43	Pembutan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	Rp 250,000,000.00	Rp 50,000,000	Rp 100,000,000	Rp 75,000,000	Rp 25,000,000	
44	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 250,000,000.00	Rp 50,000,000	Rp 100,000,000	Rp 75,000,000	Rp 25,000,000	
45	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Rp 350,000,000.00	Rp 70,000,000	Rp 140,000,000	Rp 105,000,000	Rp 35,000,000	
46	Penyelenggaraan penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	Rp 2,500,000,000.00	Rp 500,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 750,000,000	Rp 250,000,000	
47	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	Rp 300,000,000.00	Rp 60,000,000	Rp 120,000,000	Rp 90,000,000	Rp 30,000,000	
48	Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Rp 200,000,000.00	Rp 40,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000	Rp 20,000,000	
49	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
50	Surveillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO	Rp 300,000,000.00	Rp 60,000,000	Rp 120,000,000	Rp 90,000,000	Rp 30,000,000	

NO	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	Rp 250,000,000.00	Rp 50,000,000	Rp 100,000,000	Rp 75,000,000	Rp 25,000,000	
52	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 500,000,000.00	Rp 100,000,000	Rp 200,000,000	Rp 150,000,000	Rp 50,000,000	
53	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	Rp 240,000,000.00	Rp 48,000,000	Rp 96,000,000	Rp 72,000,000	Rp 24,000,000	
54	Pengendalian Pembangunan	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
55	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	Rp 100,000,000.00	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000	Rp 30,000,000	Rp 10,000,000	
56	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2020	Rp 200,000,000.00	Rp 40,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000	Rp 20,000,000	
	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	Rp 280,000,000.00	Rp 56,000,000.00	Rp 112,000,000.00	Rp 84,000,000.00	Rp 28,000,000.00	
1	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	Rp 100,000,000.00	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000	Rp 30,000,000	Rp 10,000,000	
2	Penyusunan kajian BUMD Persampahan	Rp 180,000,000.00	Rp 36,000,000	Rp 72,000,000	Rp 54,000,000	Rp 18,000,000	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Rp 11,475,000,000.00	Rp 2,295,000,000.00	Rp 4,590,000,000.00	Rp 3,442,500,000.00	Rp 1,147,500,000.00	
1	Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	Rp 350,000,000.00	Rp 70,000,000	Rp 140,000,000	Rp 105,000,000	Rp 35,000,000	
2	Pengadaan Sarana Mobilitas	Rp 5,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 1,500,000,000	Rp 500,000,000	
3	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	Rp 175,000,000.00	Rp 35,000,000	Rp 70,000,000	Rp 52,500,000	Rp 17,500,000	
4	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	Rp 2,000,000,000.00	Rp 400,000,000	Rp 800,000,000	Rp 600,000,000	Rp 200,000,000	
5	Pengadaan Meubelair	Rp 3,000,000,000.00	Rp 600,000,000	Rp 1,200,000,000	Rp 900,000,000	Rp 300,000,000	
6	Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	Rp 200,000,000.00	Rp 40,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000	Rp 20,000,000	
7	Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	Rp 300,000,000.00	Rp 60,000,000	Rp 120,000,000	Rp 90,000,000	Rp 30,000,000	
8	Penyediaan Tiang Umbul-umbul, Umbul-umbul, Vitrage dan Tiang Bendera	Rp 150,000,000.00	Rp 30,000,000	Rp 60,000,000	Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	
9	Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	Rp 300,000,000.00	Rp 60,000,000	Rp 120,000,000	Rp 90,000,000	Rp 30,000,000	

Bekasi, 2 Januari 2020
 SEKRETARIS DAERAH

Dr. HJ. RENY HENDRAWATI M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650205 199011 2 002

LAMPIRAN II
Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.273.681.020
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.550.300.020
4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	385.856.000
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	360.000.000
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330.000.000
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.225.000.000
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.000.000.000
4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12.500.525.000
4.01.4.01.03.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	162.000.000
4.01.4.01.03.01.31	Penataan Arsip	0
4.01.4.01.03.02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	20.859.450.000
4.01.4.01.03.02.12	Penyediaan Ruang Kerja	1.041.350.000
4.01.4.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	230.000.000
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000.000
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.070.000.000
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	0
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.418.100.000
4.01.4.01.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100.000.000
4.01.4.01.03.03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	445.000.000
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170.000.000
4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	125.000.000
4.01.4.01.03.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150.000.000
4.01.4.01.03.05	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
4.01.4.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0

KODE REKUNING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.29	5. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	13.092.367.000
4.01.4.01.03.29.01	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	20.000.000
4.01.4.01.03.29.02	Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	0
4.01.4.01.03.29.03	Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60.000.000
4.01.4.01.03.29.04	Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota	0
4.01.4.01.03.29.05	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	0
4.01.4.01.03.29.06	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150.000.000
4.01.4.01.03.29.07	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi (PRODESSEL)	0
4.01.4.01.03.29.08	Sinergitas Instansi Vertikal	0
4.01.4.01.03.29.11	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	0
4.01.4.01.03.29.12	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0
4.01.4.01.03.29.13	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	0
4.01.4.01.03.29.14	Monitoring dan Evaluasi K3	0
4.01.4.01.03.29.53	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	240.000.000
4.01.4.01.03.29.56	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2020	21.194.000
	Penyelenggaraan Penilaian RW Siaga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	273.600.000
4.01.4.01.03.29.09	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019	19.200.000
4.01.4.01.03.29.10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2019	87.030.000
4.01.4.01.03.29.15	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	0
4.01.4.01.03.29.16	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	0
4.01.4.01.03.29.17	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0
4.01.4.01.03.29.18	Penyusunan Peta Proses Bisnis	0
4.01.4.01.03.29.55	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	30.000.000
4.01.4.01.03.29.19	Penyusunan Dokumen Perencanaan	54.526.000
4.01.4.01.03.29.20	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	150.000.000
4.01.4.01.03.29.21	Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000
4.01.4.01.03.29.22	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0
4.01.4.01.03.29.23	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0
4.01.4.01.03.29.24	Penyelenggaraan Keprotokolan	0

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.29.25	Penyelenggaraan KOMDA HIV / AIDS	0
4.01.4.01.03.29.26	Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1.052.690.000
4.01.4.01.03.29.27	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	150.000.000
4.01.4.01.03.29.28	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	0
4.01.4.01.03.29.29	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari jadi Kota Bekasi	377.350.000
4.01.4.01.03.29.30	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	364.050.000
4.01.4.01.03.29.31	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	0
4.01.4.01.03.29.32	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	700.000.000
4.01.4.01.03.29.57	Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bekasi	250.000.000
4.01.4.01.03.29.33	Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	2.865.000.000
4.01.4.01.03.29.34	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2020	0
4.01.4.01.03.29.35	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	50.000.000
4.01.4.01.03.29.54	Pengendalian Pembangunan	82.927.000
4.01.4.01.03.29.36	Pengendalian Inflasi Daerah	73.040.000
4.01.4.01.03.29.37	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	60.000.000
4.01.4.01.03.29.38	Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	50.000.000
4.01.4.01.03.29.39	Penyusunan Naskah Kerja Sama	0
4.01.4.01.03.29.40	Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	0
4.01.4.01.03.29.41	Pembinaan Kehumasan	0
4.01.4.01.03.29.42	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	210.400.000
4.01.4.01.03.29.43	Pembutan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	371.500.000
4.01.4.01.03.29.44	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.000.000
4.01.4.01.03.29.45	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2.500.000.000
4.01.4.01.03.29.46	Penyelenggaraan penerimaan Tamu Pemerintah Kota bekasi	39.600.000
4.01.4.01.03.29.47	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	150.000.000
4.01.4.01.03.29.48	Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	178.080.000
4.01.4.01.03.29.49	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	0
4.01.4.01.03.29.50	Survaiillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO	0
4.01.4.01.03.29.51	Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	0

KODE REKUNING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.01.4.01.03.29.52	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	243.180.000
4.01.4.01.03.32	6. Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	-
4.01.4.01.03.32.01	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	0
4.01.4.01.03.32.02	Penyusunan kajian BUMD Persampahan	0
4.01.4.01.03.34	7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	8.353.317.610
4.01.4.01.03.34.01	Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	114.360.000
4.01.4.01.03.34.02	Pengadaan Sarana Mobilitas	4.200.000.000
4.01.4.01.03.34.03	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	123.215.000
4.01.4.01.03.34.04	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	2.543.556.210
4.01.4.01.03.34.05	Pengadaan Meubelair	946.854.600
4.01.4.01.03.34.09	Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	287.331.800
4.01.4.01.03.34.06	Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	0
4.01.4.01.03.34.07	Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	0
4.01.4.01.03.34.08	Penyediaan Tiang Umbul-umbul, Umbul-umbul, Vitrase dan Tiang Bendera	138.000.000
JUMLAH		66.023.815.630

LAMPIRAN III
Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	23.273.681.020		3.812.330.305		5.624.926.602		4.615.962.584		7.707.436.802		21.760.656.293	75,11%	73,53%
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen/Surat Dinas Terkirim Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Dokumen/ Surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Air, Listrik, Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel	432 Rekening	5.550.300.020	108 Rekening	957.603.719	0	1.615.998.934	216 Rekening	857.679.689	76 Rekening	1.680.028.050	400 Rekening	5.111.310.392	92,59%	92,09%
4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	83.113 Unit	500.000.000	1.354 unit	0	0	106.000.000	60.980 Unit	48.896.000	2.467 Unit	40.720.000	64.801 Unit	195.616.000	77,97%	39,12%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Volume Sampah Luas Bangunan (general cleaning service)	1.800 m3 4.520 m2	385.856.000	500 m3 1.399,5 m2	0 0	0 0	18.000.000	850 m3 1.990,5 m2	9.000.000	450 m3 1.130 m2	324.456.000	1.800 m3 4.520 m2	351.456.000	100,00%	91,08%
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	14.516 Unit	360.000.000	12.743 Unit	0	0	155.609.000	1.773 Unit	153.579.100	0	47.662.700	14.516 unit	356.850.800	100,00%	99,13%
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Barang Penggandaan Tersedianya Jasa Sewa Mesin Foto Copy	16.293 Buah 25.425 Lembar 8 Bulan	330.000.000	4.543 buah 0 0	0 0 3 bulan	11.250 buah 0 3 bulan	116.562.000	200 buah 0 3 bulan	95.840.000	1.626 buah 0 2 bulan	97.156.000	17.619 buah 0 8 bulan	309.558.000	69,38%	93,81%
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan	4.051 Unit	150.000.000	0	0	0	3.038 Unit	0	0	1.013 Unit	149.381.000	4.051 Unit	149.381.000	100,00%	99,59%
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan yang disediakan	269 Unit	70.000.000	0	0	0	201 Unit	0	0	68 Unit	67.590.000	269 Unit	67.590.000	100,00%	96,56%
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	7.866 Eksemplar	40.000.000	0	0	7.866 Eksemplar	38.208.000	0	0	0	0	7.866 Eksemplar	38.208.000	100,00%	95,52%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	52.336 Pack	2.225.000.000	19.404 pack	0		536.633.000	19.848 pack	444.710.500	12.944 pack	1.162.628.500	52.196 pack	2.143.972.000	99,73%	96,36%
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ perjalanan dinas	500 Kali	1.000.000.000	0	0	110 Kali	184.168.843	0	38.936.370	0	256.056.752	110 Kali	479.161.965	22,00%	47,92%
4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	2.220 Orang / bulan	12.500.525.000	555 Orang / bulan	2.854.726.586	555 Orang/ bulan	2.853.746.825	555 Orang/ bulan	2.839.720.925	481 orang/ bulan	3.881.757.800	2.146 orang / bulan	12.429.952.136	96,67%	99,44%
4.01.4.01.03.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan Informasi Publik	162.000 Lembar	162.000.000	0	0	151.000 Lembar	0	0	127.600.000	0	0	151.000 Lembar	127.600.000	93,21%	78,77%
4.01.4.01.03.01.31	Penataan Arsip	Jumlah Arsip yang ditata/dikelola	500 Box	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20.859.450.000		-		4.325.866.863		4.733.274.058		9.293.645.611		18.352.786.532	71,70%	50,34%
4.01.4.01.03.02.12	Penyediaan Ruang Kerja	Luas Bangunan yang Tersedia	2.310 m2	1.041.350.000	0	0	0	1.732,5 m2	196.692.000	0	444.485.200	1.732,5 m2	641.177.200	75,00%	61,57%	
4.01.4.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Luas Rumah Dinas	634 m2	230.000.000	0	0	0	475,5 m2	0	0	0	475,5 m2	0	75,00%	0,00%	
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6 Gedung, 2 taman, 1 kolam renang, 2 kolam (resapan/ air mancur), 1 lapangan tenis, 5 area parkir mobil, 3 area parkir motor, 1 saluran di lingkungan kantor wali kota bekasi, 3 rumah genset	24 Gedung dan sarana prasarana	17.000.000.000	6 gedung dan sarana	0	6 gedung dan sarana	4.325.866.863	6 gedung dan sarana	3.841.282.958	6 gedung dan sarana	7.592.948.551	24 Gedung dan sarana prasarana	15.760.098.372	100,00%	92,71%
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	164 Unit	1.070.000.000	47 Sepeda motor, 38 Mobil	0	38 Unit	0	0	368.392.100	41 Unit	449.854.200	164 Unit	818.246.300	100,00%	76,47%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas	30 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2.209 Unit	1.418.100.000	444 Unit	0	0	0	1.212 Unit	326.907.000	473 Unit	761.466.110	2.129 unit	1.088.373.110	96,38%	76,75%
4.01.4.01.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah Meubelair	90 Unit	100.000.000	0	0	0	0	0	0	50 unit	44.891.550	50 Unit	44.891.550	55,56%	44,89%
4.01.4.01.03.03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	445.000.000		-		285.930.000		6.150.000		147.100.000		439.180.000	100,00 %	98,64%
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Upacara beserta Perlengkapannya	2 Stel	170.000.000	0	0	0	137.950.000	0	6.150.000	2 Stel	24.500.000	2 Stel	168.600.000	100,00%	99,18%
		Pakaian Sipil Harian	61 Stel		64 Stel	0	0	0	0	0	0	0	61 Stel			
		Pakaian Sipil Harian KDH	1 Stel		0	0	0	0	0	0	1 Stel		1 Stel			
4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	31 Stel	125.000.000	0	0	0	0	0	0	31 Stel	122.600.000	31 Stel	122.600.000	100,00%	98,08%
4.01.4.01.03.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga dan	428 stel	150.000.000	428 stel	0	0	147.980.000	0	0	0	0	428 stel	147.980.000	100,00%	98,65%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Perlengkapannya														
4.01.4.01.03.05	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-										0		
4.01.4.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.29	5. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100%	80.000.000		-		5.650.000		-		18.700.640		24.350.640	50,00%	16,77%
4.01.4.01.03.29.01	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	Pengelolaan website jdih.bekasikota.go.id	1 Tahun	20.000.000	3 Bulan	0	3 Bulan	5.650.000	3 Bulan	0	3 Bulan	2.300.000	1 Tahun	7.950.000	100,00%	39,75%
4.01.4.01.03.29.02	Sosialisasi Peraturan Produk	Sosialisasi Peraturan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Hukum Daerah															
4.01.4.01.03.29.03	Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perda yang sudah dibahas Raperda yang sudah di asistensi	16 Perda 5 Raperda	60.000.000	1 Perda 0	0	5 Perda 0	0	1 Perda 5 Raperda	0	9 Perda 0	16.400.640	16 Perda 5 Raperda	16.400.640	100,00%	27,33%
4.01.4.01.03.29.04	Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota	Rancangan peraturan walikota yang di harmonisasi	0	0	5 Raperwal	0	15 Raperwal	0	30 Raperwal	0	10 Raperwal	0	60 Raperwal	0	0,00%	0,00%
		Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah	93%	150.000.000		-		11.629.087		1.770.000		76.539.000		89.938.087	50,00%	29,98%
4.01.4.01.03.29.05	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	Pendampingan kantor hukum profesional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.29.06	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	Perkara perdata didalam Pengadilan Negeri	8 Perkar Perdata	150.000.000	3 Perkar Perdata	0	1 Perkar Perdata	11.629.087	2 Perkar Perdata	1.770.000	2 Perkar Perdata	76.539.000	8 Perkar Perdata	89.938.087	100,00%	59,96%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perkara perdata didalam Pengadilan Tata Usaha Negara	5 Perkara TUN		0		2 Perkara		0		3 Perkara		5 Perkara			
		Perkara diluar pengadilan yang diselesaikan	10 Perkara di luar Pengadilan		0		4 Perkara		0		6 Perkara		10 Perkara			
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	70%	534.794.000		-		-		-		413.756.800		413.756.800	33,33%	28,14%
4.01.4.01.03.29.07	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi (PRODESKE L)	Pengisian data dan selalu update prodeskel se-kota bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Dokumen profil desa dan kelurahan se-kota bekasi	0		0	0	0		0	0	0	0	0			
4.01.4.01.03.29.08	Sinergitas Instansi Vertikal	Terlaksananya forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Laporan pelaksanaan forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal	0		0		0		0		0		0			
		Terkoordinasinya Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal					0		0		0		0			
4.01.4.01.03.29.11	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Lomba Kinerja Kelurahan se-Kota Bekasi	1 Event		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pembinaan Kinerja Kecamatan se-Kota Bekasi	1 Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.03.29.12	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Lomba LPM berprestasi Tingkat Kota Bekasi	1 Event	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Pembinaan SDM LPM	75 Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.29.13	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	Pencanangan dan penutupan BBGRM tingkat Kota dan tingkat Provinsi	2 Event	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Lomba BBGRM Tingkat Kota Bekasi	1 Event		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sosialisasi BBGRM Kota Bekasi	540 Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.01.4.01.03.29.14	Monitoring dan Evaluasi K3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi K3	12 Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3	1 Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.01.4.01.03.29.53	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	Penyelenggaraan Pembukaan dan Penutupan TMMD	2 Event	240.000.000	0	0	0	0	0	0	2 Event	219.494.000	2 Event	219.494.000	100,00%	91,46%
		Penyuluhan Masyarakat	1 Kali		0	0	0	0	0	0	1 Kali		1 Kali			
		Pemberian Hibah Kepada Masyarakat (Sarana Penunjang Terfasilitasnya Penyelenggaraan Pembukaan dan Penutupan TMMD)	1 Jenis			0	0	0	0	0	1 Jenis		1 Jenis			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)		
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
4.01.4.01.03.29.56	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2020	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2019	1 Laporan	21.194.000	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	0	20.862.800	1 Laporan	20.862.800	100,00%	98,44%
	Penyelenggaraan Penilaian RW Siaga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Laporan Penilaian Tingkat Kelurahan Laporan Pemantauan Wilayah Penilaian Tingkat Kelurahan	1 Laporan 1 Laporan	273.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 Laporan 1 Laporan	173.400.000	1 Laporan 1 Laporan	173.400.000	100,00%	63,38%	
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	65%	19.200.000					-			19.011.000		19.011.000	100,00%	99,02%	
4.01.4.01.03.29.09	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019	Workshop Penerapan SAKIP Prosentase Dokumen SAKIP OPD yang dilaporkan Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	19.200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 0 0	19.011.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	19.011.000	100,00%	99,02%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik	25%	87.030.000		-		-		-		78.129.000		78.129.000	100,00 %	89,77%
4.01.4.01.03.29.10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD	Dokumen LPPD Kota Bekasi Tahun 2019 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2019	1 dokumen	87.030.000	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0	78.129.000	1 Dokumen	78.129.000	100,00%	89,77%
		Sosialisasi LPPD Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019	156 Orang		0	0	0	0	0		156 Orang		156 Orang			
		Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	100%	30.000.000		-		-		-		5.400.000		5.400.000	25,00%	3,60%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)		
					I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.03.29.15	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	100,00%	0,00%
		Terlaksananya Bimtek Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, EvaDokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Kelas Jabatan/luasi Jabatan dan Kelas Jabatan	2 Kegiatan		0	0	0	0	0	0	0	0	2 Kegiatan		2 Kegiatan		
4.01.4.01.03.29.16	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Terlaksananya Workshop Standar Kompetensi Jabatan	4 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	44 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.4.01.03.29.17	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Terevaluasinya Kelembagaan Perangkat Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.29.18	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Peta Proses Bisnis	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.29.55	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	Terlaksananya Bimtek Asesor	2 Kegiatan	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	5.400.000	66,67%	18,00%
		Terlaksananya Bimtek Agen Perubahan	2 Kegiatan		0	0	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Terlaksananya Workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	2 Kegiatan		0	0	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	2.204.526.000		-		508.449.000		64.735.000		894.276.000		1.467.460.000	46,71%	33,69%
4.01.4.01.03.29.19	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	54.526.000	3 Dokumen	0	4 Dokumen	0	0	0	0	54.526.000	7 Dokumen	54.526.000	100,00%	100,00%
		Laporan	6 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	0	0	6 Dokumen							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.29.20	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekda/ASDA dengan Pejabat Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan birokrasi	90 Kali	150.000.000	19 Kali	0	33 Kali	0	7 Kali	35.180.000	30	15.900.000	89 Kali	51.080.000	98,89%	34,05%
4.01.4.01.03.29.21	Dialog/Audien si dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Dialog/Audien si Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Masyarakat Organisasi Sosial	75 Kali	2.000.000.000	2 Kali	0	5 Kali	508.449.000	22 Kali	29.555.000	23 Kali	823.850.000	52 Kali	1.361.854.000	81,36%	68,09%
		Tersedianya Karangan Bunga	1.352 Karangan Bunga		468 Karangan Bunga		106 Karangan Bungan		411 Karangan Bunga		410 Karangan Bunga		1.395 Karangan bunga			
		Tersedianya Sarung	266 Buah		266 Buah		0		0		0		266 Buah			
		Tersedianya Cendramata	17 Buah		3 Buah		6 Buah		0		0		9 buah			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.29.22	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Analisa kebijakan pemerintah daerah yang disusun oleh staf ahli	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Analisa kebijakan pemerintah daerah yang disusun oleh staf ahli	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.01.4.01.03.29.23	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Piala Tetap Wali kota	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Tersedianya Piala Kejuaraan Wali kota	23 set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.01.4.01.03.29.24	Penyelenggaraan Keprotokolan	Sarana dan Prasarana Keprotokolan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	40%	1.052.690.000		-		390.765.407		210.877.851		298.143.156		899.786.414	50,00%	42,74%
4.01.4.01.03.29.25	Penyelenggaraan KOMDA HIV / AIDS	Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Se Dunia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Laporan Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.29.26	Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	Pengelolaan Operasional Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi	1 Kegiatan	1.052.690.000	0%	0	0%	390.765.407	0%	210.877.851	1 Kegiatan	298.143.156	1 Kegiatan	899.786.414	100,00%	85,47%
		Peralatan Pembersih Masjid	21 Jenis		0	0		0		0	21 Jenis		21 Jenis			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan		0	0		0		0	2 Kegiatan		2 Kegiatan			
		Pemeliharaan Taman	1.000 m2		0	0		0		0	1.000 m2		1.000 m2			
		Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya	100%	1.841.400.000		-		51.040.000		44.383.000		282.974.000		378.397.000	35,71%	24,52%
4.01.4.01.03.29.27	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi dalam rangka mendapatkan Qori/Qoriah Kota Bekasi untuk mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	1 Kegiatan	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	144.365.000	0	144.365.000	33,33%	96,24%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembinaan Peserta Qori/Qoriah	1 Kegiatan		0		0		0		0		0			
		Tahfiz Al Quran	30 Orang		0		0		0		30 Orang		30 Orang			
4.01.4.01.03.29.28	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	Pelaksanaan Tarawih Keliling di Kota Bekasi	13 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Kota Bekasi				0		0		0		0		0		
4.01.4.01.03.29.29	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari jadi Kota Bekasi	Terfasilitasi Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	10 Hari	377.350.000	10%	0	10%	51.040.000	20%	4.900.000	40%	2.350.000	80%	58.290.000	80,00%	15,45%
4.01.4.01.03.29.30	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan di Kota Bekasi	7 Hari	364.050.000	0	0	0	0	0	0	2 Hari	35.580.000	2 Hari	35.580.000	14,29%	9,77%
		Lomba Pawai Ta'aruf	1 Kegiatan		0		0		0		0		0			
4.01.4.01.03.29.31	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ	Keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ tingkat Jawa Barat	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	0	100,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Tingkat Provinsi Jawa Barat	Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)	1 Kegiatan		0		0		0	1 Kegiatan		0		0		
4.01.4.01.03.29.32	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	Pelayanan dan Transportasi Calon Jema'ah Haji Kota Bekasi	10 Kloter	700.000.000	0	0	0	0	0	22.883.000	0	-	0	22.883.000	20,00%	3,27%
		Seleksi Calon Petugas Tim Pemandu Haji Daerah	100 Orang		0	40 Orang		0		0		0		40 Orang		
4.01.4.01.03.01.29.57	Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bekasi	Terlaksananya Peringatan Hari AIDS se Dunia	1 Kegiatan	250.000.000	0	0	0	0	0	16.600.000	0	100.679.000	0	117.279.000	0,00%	46,91%
		Laporan Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi	12 Dokumen		0	0		0		0		0		0		
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	70%	2.997.927.000		430.500.000		687.585.000		496.751.500		1.226.132.500		2.840.969.000	67,50%	70,44%
4.01.4.01.03.29.33	Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	Kajian rekomendasi kepada Wali Kota tentang kebijakan pada perangkat daerah	5 Bidang	2.865.000.000	0	430.500.000	0	675.000.000	2 Bidang	473.022.000	0	1.136.500.000	2 Bidang	2.715.022.000	70,00%	94,77%
		Laporan Bulanan	8 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		2 Laporan		0		8 Laporan			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.03.29.34	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2020	Sosialisasi	110 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Monitoring	12 Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Laporan Kegiatan P3BK	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Terwujudnya Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas sesuai ketentuan														
4.01.4.01.03.29.35	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	SBM (standar biaya masukan) Kota Bekasi Tahun 2020	1 Dokumen	50.000.000	45%	0	75%	0	100%	0	0	44.200.000	1 Dokumen	44.200.000	100,00%	88,40%
		Terbitnya Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Standar Biaya Masukan Kota Bekasi Tahun 2021	1 dokumen		45%		75%		1 Dokumen		0			1 Dokumen		
4.01.4.01.03.29.54	Pengendalian Pembangunan	Aplikasi Sistem Pelaporan K3	1 Dokumen/LS	82.927.000	0	0	1 Dokumen/LS	12.585.000	0	23.729.500	0	45.432.500	1 Dokumen/LS	81.747.000	100,00%	98,58%
		Laporan Triwulan	1 Jenis Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	0	1 Jenis Laporan	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)			
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
		Laporan SISMONTEPRA dan SILPA	2 Jenis Laporan		0		0		0	2 Laporan		0		0		2 Jenis Laporan		
		Pemeliharaan Sistem Simpelbang	1 Dokumen/LS		0		1 Dokumen/LS		0	0		0		0		1 Dokumen/LS		
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	10 Kebijakan	73.040.000		-		-			-		71.900.000		71.900.000	100,00 %	98,44%	
4.01.4.01.03.29.36	Pengendalian Inflasi Daerah	Tim Pengendalian Inflasi di Kota Bekasi	40 orang	73.040.000	40 Orang	0	0	0	0	0	0	0	71.900.000	40 Orang	71.900.000	100,00%	98,44%	
		Kajian Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Dengan Kabupaten/ Kota Sekitarnya	1 dokumen		0		0		0		0	1 Dokumen		1 Dokumen				
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	40%	110.000.000		-		60.000.000			-		-		60.000.000	27,68%	25,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)		
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
4.01.4.01.03.29.37	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	Keikutsertaan dalam Rakerkomwil, Rakernas dan Pameran City Expo	4 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	60.000.000	25,00%	100,00%
4.01.4.01.03.29.38	Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	Rapat ekspose pemrakarsa kerja sama	35 Kali	50.000.000	5 Kali	0	3 Kali	0	5 Kali	0	5 Kali	0	18 Kali	0	17,14%	0,00%	
		Pendampingan dari biro pemerintahan dan kerja sama pemprov jabar	6 Kali		0	0	0		0								
		Terfasilitasinya pengkajian kerja sama daerah			0	0	0		0								
4.01.4.01.03.29.39	Penyusunan Naskah Kerja Sama	Rapat penyusunan Draft Kerja sama	40 Kali	0	10 Kali	0	5 Kali	0	10 Kali	0	10 Kali	0	35 Kali	0	29,17%	0,00%	
		Pendampingan tim kerjasama	3 Kali		0	0	0		0								
		Terfasilitasinya penyusunan kerja sama daerah			0	0	0		0								
4.01.4.01.03.29.40	Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	Rapat evaluasi perjanjian kerja sama	55 Kali	0	15 Kali	0	5 Kali	0	10 Kali	0	10 Kali	0	40 Kali	0	39,39%	0,00%	
		Monitoring perjanjian kerjasama	55 Kali		15 Kali	0	0		10 Kali		25 Kali						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Terfasilitasinya pengendalian evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah			0		0		0		0		0			
		Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	9.300 Informasi	3.490.500.000		-		8.350.000		1.027.731.000		1.750.638.500		2.786.719.500	213,10 %	54,81%
4.01.4.01.03.29.41	Pembinaan Kehumasan	Kegiatan pembinaan kehumasan	300 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Tersampainya nya informasi kehumasan			0		0		0		0		0			
4.01.4.01.03.29.42	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	Focus Group Discussion dengan Insan Pers	12 Kali	210.400.000	3 Kali	0	0	8.350.000	0	6.490.000	0	43.200.000	3 Kali	58.040.000	25,00%	27,59%
4.01.4.01.03.29.43	Pembutan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Cetak Leaflet/ Brosur Full Colour	81.040 Lembar	371.500.000	0	0	76.000 Lembar	0	0	309.592.000	0	15.330.000	76.00 lembar	324.922.000	89,17%	87,46%
		Jumlah Cetak Stiker	243.040 Lembar		0		227.000 Lembar		0		0		227.000 Lembar			
		Jumlah Cetak Blanko Form	490 Rim		0		454 Rim		0		0		454 Rim			
		Jumlah Penjilidan	100 Jilid		0		76 Jilid		15 Jilid		0		91 jilid			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Tersedianya Jasa Sewa Mesin Foto Copy	8 Bulan		0		2 Bulan		3 Bulan		1 Bulan		6 bulan			
4.01.4.01.03.29.44	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cetak Buku Selayang Pandang	400 Buku	219.000.000	0	0	0	0	0	0	400 Buku	135.000.000	400 buku	135.000.000	54,07%	61,64%
		Jumlah Kegiatan	720 Kegiatan		130 Kegiatan		0		161 Kegiatan		157 Kegiatan		448 kegiatan			
		Cetak foto	3.600 Kegiatan		0		0		0		0		0			
4.01.4.01.03.29.45	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyebarluasan Informasi media radio	591 Siar	2.500.000.000	0	0	0	0	105 Siar	681.234.000	174 Siar	1.492.308.500	279 siar	2.173.542.500	82,13%	86,94%
		media massa yang kerjasama	5 Media		2 Media		0		2 Media		4 Media		8 media			
		Penyebarluasan informasi media antar luar ruang	97 Buah		0		0		23 Buah		15 Buah		38 buah			
4.01.4.01.03.29.46	Penyelenggaraan penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	Penerimaan kunjungan kerja ke pemda kota Bekasi	7 Kali	39.600.000	15 Kali	0	7 Kali	0	0	30.415.000	14 Kali	0	36 kali	30.415.000	514,29%	76,81%
4.01.4.01.03.29.47	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	Buku Laporan Informasi tahunan	1 Buku	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Buku	64.800.000	1 buku	64.800.000	100,00%	43,20%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan		421.260.000		-		13.600.000		137.480.000		158.500.000		309.580.000	25,00%	30,82%
4.01.4.01.03.29.48	Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Bimtek/sosialisasi/rakor/seminar/FGD/pe latihan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	214 Orang / Kali	178.080.000	0	0	13.600.000	0	137.480.000	0	27.000.000	214 Orang/ Kali	178.080.000	100,00%	100,00%	
		Belanja pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa bagi Pokja Pemilihan	23 Orang / Paket			0		0		0		23 Orang/ Paket				
		Belanja Pengiriman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa mengikuti bimtek/ sosialisasi/ rakor/seminar	6 Orang / Kali			0		0		3 Orang/ Kali		3 Orang/ Kali				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)		
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
4.01.4.01.03.29.49	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah aplikasi pengadaan Barang/jasa yang tersedia	2 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4.01.4.01.03.29.50	Surveillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO	Standar ISO 27001	1 Standarisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Laporan Audit	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		standarisasi ISO 9001:2015	3 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.29.51	Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	Pendampingan Tenaga Ahli Hukum (Penasihat Hukum)	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Jumlah Konsultasi yang diselenggarakan	25 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.29.52	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Server LPSE	1 Unit	243.180.000	0	0	0	0	0	0	0	131.500.000	0	131.500.000	33,33%	54,08%	
		Pemeliharaan generator listrik	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Pemereliharaan DRC server LPSE kota bekasi	12 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.01.4.01.03.32	6. Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	Jumlah BUMD Dalam Kondisi Sehat	7	-											0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.32.01	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	Dokumen Hasil Kajian Evaluasi BUMD Tahun Buku 2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Dasar Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Persentase Peningkatan Dividen BUMD	2%	-											0,00%	0,00%
4.01.4.01.03.32.02	Penyusunan kajian BUMD Persampahan	Dokumen Hasil Kajian Pembentukan BUMD Pers	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Tersedianya Dasar Pembentukan BUMD Persampahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.01.4.01.03.34	8. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100%	8.215.317.610		-		5.887.260.600		1.270.092.000		103.775.000		7.261.127.600	97,11%	87,88%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.01.4.01.03.34.01	Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	Monitoring dan evaluasi pengendalian BMD	2 Kali	114.360.000	2 Kali	0	0	98.106.000	0	3.360.000	0	0	2 Kali	101.466.000	92,86%	88,73%
		Sarana dan Prasarana Pengendalian BMD	7 Jenis		6 Jenis	0	0		0		0	6 Jenis				
4.01.4.01.03.34.02	Pengadaan Sarana Mobilitas	Sarana prasarana aparatur Pemerintah Kota Bekasi	8 Unit	4.200.000.000	6 Unit	0	2 Unit	3.207.000.000	0	984.000.000	0	0	8 Unit	4.191.000.000	100,00%	99,79%
4.01.4.01.03.34.03	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	Dokumen Standar Harga Tertinggi Barang (SHT) Tahun 2021	1 Dokumen	123.215.000	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	93.215.000	1 Dokumen	93.215.000	100,00%	75,65%
		Pengembangan Aplikasi Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	1 Aplikasi		0	1 Aplikasi		0		0	0		1 Aplikasi			
4.01.4.01.03.34.04	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kota Bekasi	463 Unit	2.543.556.210	0	0	364 Unit	1.635.300.000	0	0	32 Unit	10.560.000	396 unit	1.645.860.000	85,53%	64,71%
4.01.4.01.03.34.05	Pengadaan Meubelair	Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kota Bekasi	682 Unit	946.854.600	0	0	682 Unit	946.854.600	0	0	0	0	682 Unit	946.854.600	100,00%	100,00%
4.01.4.01.03.34.09	Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	Sarana dan Prasarana Aparatur Setda Kota Bekasi	36 Unit	287.331.800	0	0	36 Unit	0	0	282.732.000	0	0	36 Unit	282.732.000	100,00%	98,40%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2020) (%)		
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
		Persentase ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik	100%	138.000.000				135.943.500			-		-		135.943.500	33,33%	32,84%
4.01.4.01.03.34.06	Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	Terpasangnya Lampu Hias	25 titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Terpasangnya Lampu Hias di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.03.34.07	Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	Palang pintu parkir otomatis kendaraan roda 4 dan/ atau lebih	4 set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Tersedianya cctv	2 set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Terpasangnya Palang pintu Parkir otomatis dan CCTV												0			
4.01.4.01.03.34.08	Penyediaan Tiang Umbul-umbul, Umbul-umbul, Vitrase dan Tiang Bendera	Tersedianya Bendera Merah Putih	57 buah	138.000.000	57 buah	0	0	135.943.500	0	0	0	0	57 buah	135.943.500	100,00%	98,51%	
		Tersedianya Vitrase	450 meter		450 meter	0	0	0	0	0	0	450 meter					
		Umbul-umbul	150 buah		150 buah	0	0	0	0	0	0	150 buah					
JUMLAH				66.023.815.630		4.242.830.305		17.996.996.059		12.609.206.993		22.546.058.009		57.395.091.366	59,92%	46,47%	

LAMPIRAN IV Prestasi Dan Penghargaan

1. Piagam penghargaan peringkat B sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



2. Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Status Kinerja Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2018



3. Penghargaan Top Pembina BUMD 2020



4. Penghargaan Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019



5. Penghargaan Wali Kota Terpopuler di Media Digital 2020

